

# **TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



## **SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Hukum Islam (S.Hi) Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan  
Pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin  
Makassar*

Oleh

**ISWAN HARIS**

NIM. 10300109016

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, Agustus 2013

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R  
**ISWAN HARIS**  
**NIM. 10300109016**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “ TINDAK PIDANA PORNOGRAFI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ” yang disusun oleh saudara : Iswan Haris, NIM : 10300109016, mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, 11 September 2013 bertepatan dengan 5 Dzulqaida 1434 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.Hi), tanpa (dengan beberapa) perbaikan.

Gowa, 11 September 2013 M  
5 Dzulqaidah 1434 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof.Dr. H. Ali Parman, MA ( )  
Sekertaris : Drs. Hamzah Hasan, M.Hi ( )  
Munaqisy I : Drs. Dudung Abdullah, M.Ag ( )  
Munaqisy II : Alimuddin, S.Ag, M.Ag ( )  
Pembimbing I : Dr. Hj St Aisyah Kara, MA , Ph.D ( )  
Pembimbing II : Dra. Nila Sastrawati, M.Si ( )

Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar

Prof.Dr. H. Ali Parman, MA  
NIP: 19570414 198503 1 003

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil ‘alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Rabb semesta alam, Sang Maha Cinta, yang telah melimpahkan Hidayah dan Karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“Tindak Pidana Pornografi dalam Perspektif Hukum Islam”** dapat terselesaikan. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, sebagai sosok manusia paripurna, Sang Revolusioner Sejati yang telah mengantarkan umat manusia berhijrah dari peradaban Jahiliyyah menuju peradaban yang beradab.

Terselesainya penulisan skripsi ini sesungguhnya tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang memberikan andil secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi ini. Untuk itu, dengan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, yaitu Ayahanda Abd Haris dan Ibunda Nurhayati, S.Pd., yang telah melahirkan, membesarkan, membimbing dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan tak kenal lelah, sehingga penulis sampai kejenjang pendidikan S1, kepada keduanya penulis memanjatkan do’a semoga Allah SWT mengasihi dan mengampuni dosa-dosa keduanya dan memberikan kemuliaan di dunia dan di akhirat kelak. Amin.
2. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT., MS, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar, para Pembantu Rektor beserta seluruh Staf dan Karyawannya.

3. Bapak Prof. Dr. H. Ali Parman, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, para Pembantu Dekan beserta seluruh Staf dan Karyawannya.
4. Ibu Dra. Nila Sastrawati, M. Hi selaku Ketua Jurusan dan Alimuddin, S. Ag, M. Ag., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan yang telah membantu penulis dalam pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan administrasi perkuliahan dan kegiatan akademik.
5. Ibu Dr. Hj St Aisyah Kara, MA , Ph.D., selaku Pembimbing I dan sekali lagi kepada Ibu Dra. Nila Sastrawati, M. Si., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan dukungan dengan penuh perhatian kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Para Dosen UIN Alauddin Makassar, terkhusus kepada para Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang dengan murah hati telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis berada dibangku kuliah.
7. Saudara-saudara penulis, Ikhsan, Niar dan Indra terimakasih atas perhatian kalian dan suportnya.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, serta rekan-rekan Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, terkhusus Triyudi, Hamzah, Darna, dan Nurul Wardani Yahya.
9. Kakanda La Ode Maskur, S. Hi yang telah banyak memberikan masukan-masukan. Adindaku Muflihah Arsyad yang senantiasa tak mengenal lelah mendampingi penulis untuk mencari referensi terkait penulisan skripsi ini,

serta seluruh rekan-rekan penulis yang tidak sempat dituliskan namanya satu persatu.

Penulis sadari bahwa bagaimanapun usaha manusia, pasti ketidaksempurnaan menyertainya. Kritikan dan saran dari semua pihak selalu penulis harapkan demi memperbaiki kekurangan tersebut.

Akhirnya, sekecil apapun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi almamater, agama, bangsa dan tanah air terkhususkan lagi buat diri pribadi penulis. Dan kepada Allah SWT jualah penulis pasrahkan, semoga segala usaha serta harapan kita semua tercapai dan senantiasa berada dibawah naungan Rahmat-Nya. Amin...

Gowa, Agustus 2013

Penulis,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**Iswan Haris**  
**NIM. 10300109016**  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
ABSTRAK .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A.Latar Belakang.....	1
B.Rumusan Masalah.....	7
C.Hipotesis .....	8
D.Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	8
E.Tinjauan Pustaka .....	10
F.Metode Penelitian.....	12
G.Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
H.Komposisi Bab .....	16
<b>BAB II KONSEP TINDAK PIDANA DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. Pengertian Jarimah .....	18
B. Unsur-unsur Jarimah.....	21
C. Kategorisasi Jarimah.....	23
<b>BAB III KONSEP PORNOGRAFI</b>	
A. Pengertian Pornografi.....	33
B. Unsur-unsur Pornografi.....	35
C. Ruang Lingkup Pornografi .....	43
<b>BAB IV TINDAK PIDANA PORNOGRAFI TINJAUAN HUKUM ISLAM</b>	
A. Konsep Pornografi dalam Hukum Islam .....	47
B. Sanksi Pidana Pornografi dalam Hukum Islam.....	64
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran .....	81
DAFTAR PUSTAKA .....	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

## ABSTRAK

**Nama Penyusun : Iswan Haris**

**NIM : 10300109016**

**Judul Skripsi : Tindak Pidana Pornografi dalam Perspektif Hukum Islam**

---

Skripsi ini adalah studi tentang tindak pidana pornografi dalam perspektif hukum Islam. Pokok permasalahan adalah bagaimana tindak pidana pornografi di dalam perspektif hukum Islam serta bagaimana sanksi pidananya. Masalah ini dilihat dengan pendekatan syar'i, yuridis serta dibahas dengan metode deduktif dan induktif.

Pornografi di dalam kajian hukum, baik dalam hukum positif, maupun hukum Islam di pandang sebagai tindak pidana (jarimah). Adapun pengertian, unsur-unsur serta ruang lingkup pornografi dari sudut pandang hukum positif diatur lebih khusus dalam Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Ruang lingkup pornografi dalam hukum positif meliputi porno teks, porno suara dan pornografi dalam arti sempit. Sementara dalam hukum Islam, pornografi memiliki hubungan yang erat dengan masalah aurat dan memelihara pandangan. Secara substansial tidak terdapat perbedaan yang signifikan pornografi dalam hukum positif dan hukum Islam, hanya saja dalam perspektif hukum Islam, pornografi batasannya lebih ketat dibanding hukum positif. Jika hukum positif standarisasi pornografi adalah tindakan yang bertentangan dengan rasa kesusilaan di dalam masyarakat, maka dalam perspektif hukum Islam standarisasinya adalah aurat yang telah ditetapkan dengan pasti di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Secara substansial, apa yang dianggap pornografi dalam hukum positif, maka dengan sendirinya dianggap pula pornografi di dalam hukum Islam. Sementara apa yang dianggap pornografi dalam perspektif Islam tidak berarti merupakan pornografi pula dalam hukum positif. Hal ini karena batasan dan standarisasi dari pornografi dalam perspektif hukum positif adalah rasa kesusilaan di dalam masyarakat. Jadi standarisasinya bersifat relatif (abstrak), sementara dalam perspektif hukum Islam batasan dan standarisasi pornografi adalah aurat yang telah ditetapkan dengan pasti baik aurat laki-laki maupun aurat perempuan. Dengan demikian pornografi dalam perspektif hukum Islam lebih terdapat kepastian hukum di dalamnya dibanding dengan hukum positif.

Adapun sanksi pidana pornografi di dalam hukum Islam memiliki perbedaan dengan hukum positif. Dalam hukum positif sanksi pidananya hanya dalam bentuk kurungan/penjara yang dalam terminologi hukum Islam disebut dengan pidana ta'zir. Sementara dalam perspektif hukum Islam, sanksi pidana pornografi beragam. Sebab, tindak pidana pornografi dalam perspektif hukum Islam di dalamnya juga terdapat jarimah zina yang sanksi hukumnya telah ditetapkan dengan pasti dalam Al-Qur'an maupun Al-hadits, berupa hukuman hadd. Hukuman hadd ini dikenakan pada mereka yang berposisi sebagai objek/model pornografi yang melakukan persenggamaan dengan pasangan yang tidak halal. Sementara selain pelaku tersebut, sanksi pidananya berupa hukuman ta'zir yang berat ringannya ditentukan oleh penguasa.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Olehnya itu dalam menjalani kehidupannya, manusia senantiasa berinteraksi dengan sesamanya. Dalam melakukan interaksi sosial, manusia senantiasa diikat oleh norma sosial atau norma hukum yang menuntunnya untuk berperilaku sebagaimana mestinya (yang layak). Tujuannya agar tercipta hubungan harmonis antar sesama manusia, sehingga tercipta ketertiban di tengah-tengah kehidupan sosial.

Namun demikian, interaksi tersebut tidak selamanya berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini karena kehidupan sosial adalah kehidupan yang kompleks yang terdiri dari beragam ras, agama dan budaya, sehingga melahirkan keragaman nilai. Nilai inilah yang menjadi tolak ukur setiap individu atau kelompok masyarakat dalam bertindak. Tindakan seseorang atau sebuah kelompok terkadang dianggap baik oleh orang atau kelompok lain, namun bagi orang atau kelompok lain merupakan tindakan yang tercela (melanggar nilai-nilai yang ideal).

Interaksi seperti tersebut di atas semakin nampak di tengah kehidupan globalisasi saat ini. Dimana perkembangan teknologi dan informasi yang tumbuh pesat telah menciptakan dunia yang terlipat, yakni dimensi ruang telah menjadi sempit dan

dimensi waktu telah menjadi singkat.<sup>1</sup> Dengan kata lain, globalisasi telah menciptakan ruang yang tak berjarak. Sebuah peristiwa yang jauh di bagian negara (daerah) lain akan dapat diketahui dalam waktu yang relatif singkat (dalam waktu bersamaan). Olehnya itu, keadaan seperti ini mewujudkan terjadinya transformasi budaya (nilai). Misalkan budaya Barat yang masuk mempengaruhi budaya Timur, termasuk Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Padahal jika dicermati, budaya Barat dengan mempertontonkan aurat (pornografi maupun pornoaksi) sebagai sesuatu yang lumrah, bagi budaya Indonesia yang didominasi oleh ajaran Islam dianggap sebagai sesuatu yang melanggar nilai atau ajaran agama.

Era globalisasi seperti tersebut di atas dengan kekuatan kecanggihan teknologinya mengakibatkan timbulnya berbagai macam penggambaran tentang sensualitas (khususnya perempuan) di layar televisi atau media massa. Penggambaran tersebut baik dalam kemasan film atau iklan di layar televisi maupun di media massa. Ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Hj. Siti Sholihati seorang aktivis perempuan dalam karyanya wanita dan media massa. Walau pun pada hakikatnya Siti Sholihati mengkritisi tanyangan televisi atau iklan-iklan di media massa hubungannya dengan konsep gender, namun merupakan hal yang objektif bahwa di media dalam iklan senantiasa menjadikan perempuan sebagai pemikat produk dengan mempertontonkan sensualitasnya (pornografi). Dalam karya tersebut, ia mengatakan bahwa perempuan dalam iklan televisi digambarkan sebagai individu yang memiliki karakter (ciri) genit

---

<sup>1</sup> Lihat penjelasan A. Qadri Azizy., *Melawan Globalisasi: Reinterpretasi Ajaran Islam (Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani)* (Cet. V; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 19-20.

dengan beberapa indikator seperti, tersenyum genit, gerakan mata (kedipan, lirikan dan tatapan) menggoda, gaya berjalan dan menggerakkan tubuh secara berlebihan, serta jeritan (teriakan kecil) dan nada yang tidak wajar.<sup>2</sup>

Berdasarkan hasil penelitiannya terkait perempuan dan media massa hubungannya dengan tindakan perempuan sebagai pemikat pria, lebih jauh Siti Sholihati mengatakan bahwa<sup>3</sup>:

1. Secara umum wanita digambarkan ingin selalu berusaha menarik perhatian kaum pria.
2. Dalam beberapa scene iklan, wanita divisualisasikan sebagai sosok yang genit.
3. Secara mencolok beberapa tayangan iklan televisi menempatkan posisi (mencitrakan) wanita sebagai sosok penggoda pria.
4. Iklan menampilkan perspektif bahwa ketertarikan kaum pria terhadap kaum wanita cantik secara khusus berkonotasi seksual.

Apa yang dijabarkan oleh Siti Sholihati di atas merupakan bagian dari pornografi, meskipun pada dasarnya ia memandang dari aspek lain, yaitu dominasi kaum laki-laki atas perempuan yang terjadi di dalam media massa atau media elektronik.

Kata pornografi pada dasarnya merupakan sebuah terminologi yang baru muncul di abad modern. Namun, makna yang dikandung oleh pornografi tersebut sudah sejak lama dikenal oleh masyarakat luas, bahkan semenjak pertama kali Islam

---

<sup>2</sup> Siti Sholihati, *Wanita dan Media Massa* (Cet. I; Yogyakarta: TERAS, 2007), h. 135.

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 137-139.

diturunkan sebagai pedoman hidup umat manusia. Kata pornografi menurut asal katanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu *porne* yang berarti pelacur dan *graphein* yang berarti ungkapan.<sup>4</sup> Selain itu, kata pornografi juga dapat diartikan dengan gambar pelacur. Dengan demikian, secara sederhana pornografi dapat diartikan sebagai gambar yang memuat tentang pelacuran atau suatu perkataan atau tulisan yang memuat tentang pelacuran.

Dalam kamus bahasa Indonesia, kata pornografi diartikan sebagai penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi. Atau bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.<sup>5</sup> Jadi penekanan yang ada dalam pengertian ini adalah maksud atau tujuan dari penggambaran tersebut, yakni hendak membangkitkan nafsu birahi dalam seks.

Pengertian pornografi di atas sesungguhnya bukanlah pengertian yang bersifat absolut dan universal. Sebab, dalam dimensi kehidupan sosial kemasyarakatan, kata pornografi diartikan berbeda oleh hampir setiap kelompok sosial. Hal ini karena di pengaruhi oleh berbagai macam cara pandang, misalkan perbedaan budaya seseorang akan berakibat terhadap pemaknaan yang berbeda terhadap pornografi, demikian juga perbedaan agama.

---

<sup>4</sup> Lihat. Neng Djubaedah, *Ponografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2009), h. 144.

<sup>5</sup> Rizky Maulana dan Putri Amelia, *Kamus Pelajar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Lima Bintang, tanpa tahun), h. 331.

Pornografi sebagai sesuatu yang dianggap lumrah dalam budaya barat, di tengah-tengah budaya Timur hal itu di anggap sebagai sesuatu yang melanggar norma. Sehingga tindakan pornografi di anggap sebagai sebuah tindak pidana. Namun demikian, pornografi sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum positif di Indonesia memiliki perbedaan dengan pandangan Islam. Perbedaan itu menyangkut masalah batasan (kapan sesuatu dianggap pornografi). Dalam pandangan hukum positif sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 memberikan sebuah penjelasan tentang pornografi, yakni:

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”<sup>6</sup>

Jika dicermati Redaksi pasal tersebut, sesungguhnya telah menjelaskan rumusan yang cukup sempurna tentang tindak pidana pornografi. Namun, yang menjadi masalah adalah sebuah tindakan akan di anggap sebagai sebuah tindakan pornografi jika tindakan tersebut melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Ini berarti bahwa meskipun sebuah tindakan secara objektif merupakan sebuah tindakan pornografi, namun jika tindakan tersebut tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dimana tindakan tersebut terjadi, maka hal itu tidak dianggap sebagai tindakan pornografi. Misalkan sebuah media massa (koran) di Papua yang berisi tentang foto seorang wanita yang memakai pakaian Koteka (adat Papua), maka gambar tersebut

---

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Unadang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

tidak dapat dikatakan sebagai pornografi, karena tidak bertentangan dengan norma kesusilaan yang ada di daerah Papua.

Hal tersebut di ataslah yang membedakan antara pornografi dalam tinjauan hukum positif dengan pornografi dalam tinjauan hukum Islam. Dalam pandangan hukum Islam, hukum agama (dalam artian Syariat) merupakan hukum Allah yang bersifat absolut, berlaku universal dan tidak dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Sehingga hukum Islam yang diberlakukan di suatu tempat akan sama dengan hukum Islam yang diberlakukan di tempat lain dan dalam waktu yang berbeda.

Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam Qur'an Surat Saba' ayat 28:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

Terjemahannya:

“Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya”.

Lebih lanjut Allah SWT menjelaskan tentang keabadian Hukum Islam dalam Qur'an Surat Al-An'am ayat 115:

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١١٥﴾

Terjemahannya:

“Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Quran) sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah robah kalimat-kalimat-Nya dan Dia lah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Kedua ayat tersebut di atas jika disimak secara seksama akan didapatkan pemahaman tentang penjelasan keabadian dan keuniversalan hukum Islam.

Jika merujuk pada dalil di atas (dalam konsep hukum Islam), sebuah tindakan yang telah ditetapkan dalam syariat sebagai sebuah tindakan pidana—dalam hal ini adalah pornografi—bagaimana pun keadaannya, serta ditempat mana pun tetap di anggap sebagai sebuah tindak pidana (pornografi), meskipun dalam pandangan masyarakat setempat hal tersebut di anggap tidak melanggar norma kesusilaan. Hal ini karena hukum agama (Allah) berada di atas segala hukum yang ada.

Sehubungan dengan apa yang telah dikemukakan di atas, maka penulis hendak melakukan penelitian tentang tindak pidana pornografi. Penelitian ini penulis khususkan dalam perspektif hukum Islam. Hal ini penulis lakukan mengingat belum banyak atau bahkan belum ada sama sekali yang mengkaji masalah tindak pornografi dalam perspektif hukum Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan mengemukakan masalah pokok dalam skripsi ini, yakni “bagaimana konsep pornografi dalam perspektif hukum Islam”. Dari masalah pokok tersebut, maka penulis merumuskan sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pornografi dalam hukum Islam?
2. Bagaimana sanksi tindak pidana pornografi dalam Islam?

### C. Hipotesis

Hipotesis berasal dari kata *hypo* (lemah) dan *tesis* (pernyataan). Jadi hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah, maka perlu dibuktikan untuk menegaskan apakah suatu hipotesis diterima atau harus ditolak, berdasarkan fakta atau data empirik yang telah dikumpulkan dalam penelitian.<sup>7</sup> Atau dengan kata lain hipotesis adalah merupakan dugaan sementara terhadap jawaban atas masalah pokok yang diajukan.<sup>8</sup>

Adapun hipotesis dari judul “Tindak Pidana Pornografi dalam Perspektif Hukum Islam” adalah sebagai berikut:

1. Konsep pornografi dalam perspektif Islam memiliki makna yang sangat luas, yang meliputi tindakan mempertontonkan aurat melalui media massa atau media elektronik.
2. Tindak pidana pornografi dalam perspektif hukum Islam dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana hudud atau ta’zir.

### D. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

Judul skripsi ini adalah “Tindak Pidana pornografi dalam Perspektif Hukum Islam.” Agar tidak terjadi ambiguitas dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis akan memberikan pengertian tentang judul di atas. Adapun item-item judul tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Edisi I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 58.

<sup>8</sup> A. Qadir Gassing dan Wahyuddin Halim, ed., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi* (Cet. II; Makassar: Alauddin Press, 2009), h. 9.



Tindak pidana dalam kamus hukum diartikan sebagai peristiwa pidana, suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhkan hukuman.<sup>9</sup> Dalam hukum Islam tindak pidana disebut *Jarimah* atau *Jinayah* yang secara etimologi diartikan sebagai melukai, berbuat dosa dan kesalahan.<sup>10</sup> Secara terminologis *jarimah* dalam syari'ah Islam yaitu larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah SWT., dengan hukuman had atau ta'zir.<sup>11</sup>

Pornografi. Kata pornografi berasal dari bahasa Yunani, yakni *porne* yang berarti pelacur dan *graphein* yang berarti ungkapan.<sup>12</sup> Dalam kamus bahasa Indonesia, kata pornografi diartikan sebagai penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi. Atau bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.<sup>13</sup> Namun, dalam skripsi ini pemaknaan pornografi mengambil terminologi dalam keilmuan hukum, yakni gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>14</sup>

---

<sup>9</sup> Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum: Internasional-Indonesia* (Cet. I; T.tp: WIPRESS, 2007), h. 478.

<sup>10</sup> Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 110.

<sup>11</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 1.

<sup>12</sup> Neng Djubaedah., *Loc.Cit.*

<sup>13</sup> Rizky Maulana dan Putri Amelia., *Loc. Cit.*

<sup>14</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Unadang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Perspektif. Kata perspektif dalam skripsi ini diartikan sesuai dengan kamus bahasa Indonesia, yakni sudut pandang.

Hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun Al-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal-relevan pada setiap zaman (waktu) dan makan (ruang) manusia.<sup>15</sup>

Jadi penelitian ini tentang “Tindak Pidana Pornografi dalam Perspektif Hukum Islam” adalah perbuatan pidana yang dilakukan dengan cara memuat gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual, ditinjau dari sudut pandang hukum Islam. Yakni hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun Al-Sunnah.

#### **E. Tinjauan Pustaka.**

Dalam penulisan karya tulis ilmiah, tinjauan pustaka menduduki posisi yang cukup penting. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan bahwa masalah pokok atau judul yang akan dibahas serta diteliti memiliki relevansi dalam beberapa penelitian atau studi yang telah dilakukan oleh para ahli.

Adapun kajian yang telah dilakukan antara lain, sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Said Agil Husain Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Cet. I; Jakarta: Penamadani, 2004 ), h. 6-7. Lihat juga. A. Qadri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, Edisi Revisi (Cet. I; Jakarta: Teraju, 2004), h. 123.

*Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*, karangan Neng Djubaedah menjelaskan tentang hubungan pornografi dan pornoaksi dengan tujuan hukum Islam. Selain itu, buku tersebut juga menganalisis tindak pidana pornografi dan pornoaksi yang terdapat dalam KUHP dan RUU-KUHP ditinjau dari Hukum Islam. Jadi hukum Islam dalam buku ini hanya menjadi pisau analisis dalam menilai pornografi dan pornoaksi dalam KUHP dan RUU-KUHP.

*Asas-asas Hukum Pidana Islam*, karangan Ahmad Hanafi mengelaborasi tentang asas-asas pidana Islam. Selain itu juga, buku tersebut menjelaskan tentang percobaan melakukan jarimah, turut berbuat jarimah, pertanggung jawaban pidana, hukuman serta sebab-sebab hapusnya hukuman.

*Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, karangan Mardani menyoroti asas-asas hukum Islam, tujuan hukum Islam dan hukum pidana Islam yang meliputi pengertian tindak pidana Islam, unsur-unsur tindak pidana Islam dan kategorisasi tindak pidana Islam.

*Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, karangan A. Qadri Azizy yang menjelaskan tentang Hukum Islam secara umum, perbedaan antara hukum Islam dan Fiqh.

*Wanita dan Media Massa*, karangan Hj Siti Sholihati yang menjelaskan tentang peran media massa dalam memberikan penggambaran terhadap wanita. Salah satu sub pembahasan dalam buku ini menjelaskan tentang bagaimana peran media dalam memberikan citra terhadap wanita sebagai sosok pemikat pria dengan mempertontonkan sensualitasnya.

Berdasarkan uraian pada buku-buku tersebut, secara umum membahas masalah tindak pidana, termasuk tindak pidana pornografi. Di lain sisi buku-buku tersebut dalam menjelaskan tentang tindak pidana, termasuk pornografi hanya mengacu kepada pornografi dalam konsep hukum positif, serta tidak menjelaskan tentang tindak pidana pornografi dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini membahas tentang tindak pidana pornografi dalam perspektif Islam.

#### **F. Metodologi Penelitian**

Di dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian.**

Dalam penelitian ilmiah dikenal beberapa jenis penelitian, antara lain penelitian historis, studi kasus, eksploratif, deskriptif, eksplanatif, dan sebagainya. Di antara beberapa jenis penelitian tersebut yang relevan dengan penelitian karya tulis ilmiah ini (skripsi) adalah jenis penelitian eksploratif, yakni penelitian yang bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu, atau untuk mendapatkan ide-ide baru mengenai suatu gejala itu.<sup>16</sup> Hal ini karena pada dasarnya meskipun telah banyak dilakukan penelitian terkait masalah pornografi, namun penelitian tersebut menyangkut pornografi dalam perspektif hukum positif. Sementara penelitian tindak pidana pornografi dalam perspektif hukum Islam masih sangat jarang.

##### **2. Metode Pendekatan**

---

<sup>16</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, h. 25.

Pada bagian ini penulis menjelaskan perspektif yang digunakan dalam membahas objek penelitian. Metode pendekatan ini mengungkapkan pola pikir yang digunakan untuk membahas objek penelitian. Jadi, setelah membahas pendekatan ini diharapkan terdapat pemahaman yang baru tentang tindak pidana pornografi dalam perspektif hukum Islam. Adapun pendekatan yang penulis pakai dalam menganalisis hal ini adalah:

- a. Pendekatan syar'i, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengutip teks-teks Al-Qur'an dan Hadits serta Ijtihad para ulama. Dalam penelitian ini, pendekatan berupa teks-teks Al-Qur'an, hadits serta Ijtihad para ulama hanya menyangkut pokok kajian penulis, yakni terkait dengan tindak pidana pornografi.
- b. Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan ini merupakan pendekatan yang mengkaji hukum sebagai norma-norma positif yang dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Asumsi ini dapat penulis rincikan bahwa pendekatan yuridis normatif dalam penelitian yang penulis maksudkan adalah pendekatan dalam memahami objek penelitian dengan meninjau teks-teks hukum yang telah ada. Teks-teks hukum tersebut baik bersifat sumber-sumber hukum, doktrin-doktrin hukum, asas-asas hukum, dalil-dalil hukum atau bahkan sekedar penjelasan seputar teks yang mengandung hukum yang berkaitan dengan konsep tindak pidana pornografi.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Pada bagian ini mencakup penjelasan tentang tehnik-tehnik yang digunakan dalam pengumpulan data.

a. Jenis data.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data kualitatif. Jenis data Kualitatif digunakan untuk mendapat data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna.<sup>17</sup>

b. Sumber data.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer, yakni sumber utama yang menjadi rujukan skripsi ini dan sumber sekunder, yakni sumber tambahan yang digunakan untuk melengkapi data-data yang ada dalam sumber primer. Sumber primer dalam penelitian tindak pidana pornografi dalam perspektif hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits dan aturan perundang-undangan yang berlaku yang membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi. Sedangkan sumber sekundernya adalah pendapat para ulama atau para pakar terkait masalah tindak pidana pornografi.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data.

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Cet. VI; Bandung: ALFABETA, 2009 ), h. 9.

Setelah data yang berhubungan dengan penulisan karya ilmiah ini dikumpulkan, maka penulis kemudian melakukan pengolahan dan analisis data. Hal ini penulis lakukan dengan menggunakan metode, yakni:

- a. Metode induktif, yakni proses bernalar yang bermula dari statemen-statemen khusus untuk tiba pada suatu simpulan yang berdaya laku umum.<sup>18</sup> Metode induktif ini penulis gunakan untuk memperoleh konsep umum tentang tindak pidana pornografi yang diperoleh dari beberapa data, berupa teks Al-Qur'an, Hadits, pendapat para ulama/pakar dan aturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Metode deduktif, yakni proses bernalar yang bermula dari statemen umum untuk tiba pada suatu kesimpulan yang khusus tentang suatu hal tertentu.<sup>19</sup> Metode ini penulis gunakan setelah mendapatkan konsep umum tentang tindak pidana pornografi, maka untuk menentukan sanksi pidana yang berlaku bagi para pelaku tindak pidana pornografi penulis menggunakan penalaran ini.

## **G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui konsep tindak pidana pornografi dalam perspektif hukum Islam.

---

<sup>18</sup> Soetandyo Wignjoebroto dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta., ed. *Metode Penelitian Hukum: Kostelasi dan Refleksi* (Edisi I; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), h. 98.

<sup>19</sup> *Ibid.*

- b. Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku tindak pidana pornografi dalam perspektif hukum Islam.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan ilmiah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih atau kontribusi bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu keislaman pada khususnya.
- b. Kegunaan praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tindak pidana pornografi beserta sanksi hukumnya dalam perspektif hukum Islam, sehingga dengan demikian dapat menghindari tindak pidana pornografi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta dapat menjalankan dan menegakan hukum agama.

## H. Garis Besar Isi

Sistematika penyusunan skripsi ini dalam pembahasannya dibagi dalam lima bab dan setiap bab dibagi dalam sub bab dengan perincian sebagai berikut:

Pada bab pertama adalah pendahuluan, pada bab pendahuluan ini memuat latar belakang masalah dan rumusan masalah, hipotesa, definisi operasional dan ruang lingkup, tinjauan pustaka, metode penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta garis besar isi skripsi.

Pada bab kedua adalah konsep tindak pidana dalam Islam. Pada bab ini berisikan pengertian jarimah, unsur-unsur jarimah, dan kategorisasi jarimah.



Selanjutnya pada bab ketiga konsep pornografi. Pada bab ini berisikan pengertian pornografi, unsur-unsur pornografi, dan ruang lingkup pornografi.

Pada bab keempat adalah tindak pidana pornografi tinjauan hukum Islam. Pada bab ini, penulis membahas tentang konsep pornografi dalam hukum Islam dengan berawal memaparkan secara singkat substansi pornografi dalam hukum positif, setelah itu dari substansi itu penulis melakukan penalaran dengan metode analagi untuk memahami dan memaparkan konsep pornografi dalam hukum Islam. Selain penulis membahas masalah konsep pornografi dalam hukum Islam, penulis juga dalam bab ini mengkaji sanksi pidana pornografi dalam hukum Islam.

Bab kelima adalah penutup, yang mana dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan di sini merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada pada bab pertama yang selanjutnya penulis memberikan saran-saran hubungannya dengan permasalahan pornografi tersebut.

## BAB II

### KONSEP TINDAK PIDANA DALAM ISLAM

#### ***A. Pengertian Jarimah***

Sebelum lebih jauh dijelaskan mengenai tindak pidana pornografi, dalam penulisan karya ilmiah ini penulis terlebih dahulu menjelaskan mengenai pengertian jarimah yang umumnya dipahami sebagai perbuatan pidana. Penjelasan mengenai pengertian jarimah ini dilakukan mengingat bahwa di dalam fikih jinayat terdapat dua istilah yang menjelaskan tentang perbuatan pidana, yaitu *jinayat* dan *jarimah*. Untuk memperoleh pengertian yang komprehensif terkait pengertian jarimah tersebut, maka penulis juga mengemukakan pengertian jinayat, dengan maksud agar dapat dibedakan antara pengertian jinayat dan jarimah.

Pada dasarnya jinayat dan jarimah secara etimologis mempunyai arti dan arah yang sama. Dan umumnya istilah yang satu (jinayat) menjadi *muradif* (sinonim) bagi istilah yang lainnya atau keduanya bermakna tunggal. Namun demikian keduanya memiliki perbedaan di dalam penerapan kesehariannya. Olehnya itu demi mencegah kekeliruan atas penggunaan istilah tersebut, maka penulis akan mengemukakan masing-masing pengertian istilah tersebut agar dapat dipahami maknanya secara utuh.

Jinayat mengandung arti perbuatan dosa, perbuatan salah atau jahat. Jinayat adalah *masdhar* (kata asal) dari kata kerja (*fi'il madhi*) *janna* yang mengandung arti suatu kerja yang diperuntukkan bagi satuan laki-laki yang telah berbuat dosa atau

salah.<sup>20</sup> Pelaku kejahatan itu sendiri disebut dengan *jaani* yang merupakan bentuk singular bagi satuan laki-laki atau bentuk *mufrad mudzakkara* sebagai pembuat kejahatan atau *isim fa'il*.<sup>21</sup> Sedangkan sebutan pelaku kejahatan wanita disebut janiaah, yang artinya dia (wanita) yang telah berbuat dosa.

Secara terminologi pengertian jinayat oleh beberapa ahli memberikan pengertian yang berbeda, namun merujuk kepada substansi pengertian yang sama. Menurut Sayid Sabiq sebagaimana yang dikutip oleh Mardani, memberikan pengertian Jinayat sebagai berikut:

“Jinayat dalam defenisi syara’ yaitu setiap perbuatan yang diharamkan dan perbuatan yang diharamkan adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh Allah (Syar’i), karena ada bahaya yang menimpa agama, jiwa, kehormatan, dan harta.”<sup>22</sup>

Tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Sayid Sabiq tersebut, menurut Abdul Kadir dalam kitabnya *At-Tasyri Al Jina’i Al Islamy* yang dikutip oleh H. Rahmat Hakim memberikan pengertian Jinayat sebagai berikut:

“Jinayah menurut bahasa merupakan nama bagi sebuah perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan Syara’, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dan harta benda.”<sup>23</sup>

Dari pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahwa jinayat merupakan semua perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan disini adalah tindakan yang dilarang atau dicegah oleh Syara’ (Hukum Islam) yang apabila dilakukan perbuatan

---

<sup>20</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayat)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 12.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 112.

<sup>23</sup> *Loc. Cit.*

tersebut memiliki konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda.

Sedangkan *jarimah* secara etimologi mengandung arti melukai, berbuat dosa, dan kesalahan. Menurut Ahmad Warson Munawir sebagaimana yang dikutip oleh Mardani, pengertian etimologis *jarimah* adalah berbuat dosa atau kesalahan, berbuat kejahatan dan delik.<sup>24</sup> Sementara itu *jarimah* setelah terminologi diartikan sebagai larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah SWT., dengan hukuman had atau ta'zir.<sup>25</sup> Dalam pengertian tersebut, antara *jinayah* dan *jarimah* sangat sulit dibedakan, sebab keduanya memiliki pengertian yang identik satu sama lain. Namun demikian, kedua istilah tersebut dalam penggunaannya sehari-hari dapat dibedakan.

Kata *jarimah* biasa dipakai sebagai perbuatan dosa—bentuk, macam atau sifat perbuatan dosa tersebut. Misalnya, pencurian, pembunuhan, perkosaan, atau perbuatan yang berkaitan dengan politik dan sebagainya. Dari penggunaan ini, kata *jarimah* identik dengan pengertian hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran yang dalam istilah hukum positif diistilahkan dengan delik atau tindak pidana. Sedangkan pemakaian kata *jinayah* lebih mempunyai arti lebih umum (luas), yaitu ditujukan bagi segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan kejahatan manusia dan tidak ditujukan bagi satuan perbuatan dosa tertentu. Oleh karena itu dalam pembahasan tindak pidana pornografi ini, penulis menggunakan istilah *jarimah*, bukan *jinayah*.

---

<sup>24</sup> Mardani, *Op. Cit.*, h . 110.

<sup>25</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Cet. V; Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h.1. Lihat juga Mardani., *Loc. Cit.*

## B. Unsur-Unsur Jarimah

Berbicara unsur-unsur jarimah pada dasarnya berbicara tentang hal-hal atau syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai jarimah (tindak pidana). Dari definisi tentang jarimah, yakni larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukuman had atau hukuman *ta'zir* dapatlah dipahami tentang unsur-unsur jarimah. Untuk lebih jelasnya mengenai suatu perbuatan dikategorikan sebagai jarimah, maka penulis akan menguraikannya sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Ada nash yang melarang tindak pidana dan ada pula hukum-hukumnya. Ini dinamakan dalam istilah undang-undang dengan rukun syar'i (unsur formil) untuk jarimah.

Jadi jika suatu perbuatan yang mana perbuatan tersebut tidak ada larangannya atau perintah untuk melaksanakannya dalam nash, maka perbuatan tersebut hukumnya boleh. Sehingga jika ada yang melakukan perbuatan tersebut, maka tidak dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Jika dicermati poin nomor 1 (satu) tersebut terkait unsur-unsur jarimah, sesungguhnya menegaskan akan adanya asas legalitas, yakni suatu perbuatan tidak dapat dipidana, jika perbuatan tersebut tidak ada nash yang melarangnya.

2. Adanya perbuatan yang berbentuk jarimah, baik berupa perbuatan atau sikap tidak berbuat. Ini dinamakan dengan rukun mâdî (unsur materil) untuk jarimah.

Jika dicermati unsur ini, sesungguhnya merupakan turunan dari unsur sebelumnya. Sebab, walaupun ada larangan atau perintah syar'i jika tidak ada

---

<sup>26</sup> Mardani, *Op.Cit.*, h. 114.

perbuatan yang melawan atau tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh syar'i, maka sebuah tidak mungkin ada yang namanya jarimah.

3. Adanya pelaku tindak pidana tersebut adalah orang *mukallaf* (cakap hukum), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawabannya. Ini kami menamakannya dengan rukun 'adabi (unsur moril).

Sebagaimana diketahui bahwa untuk dikatakannya suatu perbuatan tergolong jarimah adalah adanya perintah-perintah dan larangan-larangan dari syara', maka perintah-perintah dan larangan-larangan itu hanya ditujukan kepada orang yang berakal sehat dan dapat memahami pembebanan (*taklif*), sebab pembebanan itu artinya panggilan (khitab), dan selain orang seperti hewan dan benda-benda mati tidak dapat memahami, dengan begitu tidak mungkin menjadi objek panggilan tersebut.

Bahkan orang-orang yang dapat memahami pokok panggilan (khitab), tetapi tidak mengetahui perincian-perinciannya, apakah berupa suruhan atau larangan, apakah akan membawa pahala atau siksa, seperti orang gila dan kanak-kanak yang belum tamyiz, maka keduanya dipersamakan dengan hewan dan benda-benda mati. Jadi pada dasarnya jika ada sebuah perbuatan dan perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan oleh syara', tetap saja pelaku tidak dapat dikenai hukum jika yang melakukan tersebut adalah anak-anak yang belum tamyiz atau orang gila.

Ketiga uraian di atas terkait masalah unsur-unsur jarimah, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Dalam artian,

ketiga unsur tersebut di atas merupakan pembentuk sehingga terwujud jarimah. Jadi, jika terpenuhi unsur pertama dan kedua, namun unsur ketiga tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikatakan jarimah. Demikian juga dengan unsur-unsur yang lain. Singkatnya, ketiga unsur tersebut harus ada, agar suatu perbuatan terklasifikasikan sebagai jarimah.

### **C. Kategorisasi Jarimah**

Kategorisasi adalah suatu upaya untuk melakukan penggolongan. Hubungannya dengan jarimah, maka kategorisasi ini merupakan upaya untuk mengelompokkan atau menggolongkan berdasarkan sudut pandang mana ditinjau jarimah tersebut, misalkan berdasarkan berat ringannya sanksi hukum dari jarimah.

Adapun kategorisasi yang biasa dilakukan terkait masalah jarimah ini adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Dilihat dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dibagi menjadi tiga, yaitu jarimah hudud, jarimah qishash diyat, dan jarimah ta'zir.
2. Dilihat dari niat si pembuat, jarimah dibagi dua, yaitu: jarimah sengaja dan jarimah tidak sengaja.
3. Dilihat dari segi mengerjakannya, jarimah dibagi menjadi jarimah positif dan jarimah negatif.
4. Dilihat dari orang yang menjadi korban (yang terkena) akibat perbuatan, jarimah dibagi menjadi jarimah perseorangan dan jarimah kelompok (masyarakat).

---

<sup>27</sup> Ahmad Hanafi, *Op. Cit.*, h. 6-7.

5. Dilihat dari segi tabiatnya yang khusus, jarimah dibagi menjadi jarimah biasa dan jarimah politik.

Untuk lebih jelasnya uraian masalah kategorisasi tersebut, maka penulis akan menguraikannya sebagai berikut:

1. Jarimah hudud, qishash diyat dan ta'zir.
  - a. Jarimah hudud.

Had (hudud) secara etimologi mempunyai banyak arti, yaitu batasan sesuatu, sesuatu yang telah ditentukan, hukuman dan larangan.<sup>28</sup> Jarima hudud adalah suatu jarimah yang bentuknya telah ditentukan syara sehingga terbatas jumlahnya. Selain ditentukan bentuknya (jumlahnya), juga ditentukan hukumannya secara jelas, baik melalui Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Lebih dari itu, jarimah ini termasuk dalam jarimah yang menjadi hak Tuhan. Sedangkan secara terminologi jarimah yang diancamkan hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan.<sup>29</sup> Jarimah-jarimah yang menjadi hak Tuhan pada prinsipnya adalah jarimah yang menyangkut masyarakat banyak, yaitu untuk memelihara kepentingan, ketentraman, dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, hak Tuhan identik dengan hak jamaah atau hak masyarakat, maka pada jarimah ini tidak dikenal pemaafan atas pembuat jarimah, baik oleh perseorangan yang menjadi korban jarimah (mujnaa alaih) maupun oleh Negara.

---

<sup>28</sup> Mardani, *Op. Cit.*, h. 115.

<sup>29</sup> Rahmat Hakim, *Op. Cit.*, h. 26.



Karena jarimah ini sudah ditentukan hukumannya oleh Tuhan di dalam syara, sehingga tidak ada pilihan, maka hukuman bagi jarimah ini tidak memiliki batas terendah maupun batasan tertinggi seperti layaknya hukuman yang lain. Jarimah hudud terdiri atas tujuh, yaitu zina, *qadzaf* (menuduh orang lain berbuat zina), minum-minuman keras, mencuri, haribah (pembegalan/perampokan), gangguan-keamanan, murtad, dan pemberontakan (*al-baghyu*).<sup>30</sup>

b. Jarimah Qishash-Diyat.

Qishash secara etimologi adalah balasan dan perbuatan yang sama seperti yang seseorang perbuat. Sedangkan pengertian diyat secara etimologi adalah denda.<sup>31</sup> Sedangkan pengertian jarimah qishash dan diyat secara terminologi adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman qishash dan diyat. Setiap qishash dan diyat mempunyai hukuman yang telah ditentukan, sebagai hak perorangan. Maksud muqaddarah (hukuman yang telah ditentukan) adalah bahwa qishash dan diyat mempunyai satu batasan, tidak ada baginya batasan tertinggi dan batas qishash yang terendah yang fleksibel antara keduanya. Maksud qishash dan diyat sebagai hak perorangan adalah bahwa si korban mempunyai hak memaafkan pelaku tindak pidana, bila ia menghendaki. Apalagi jika ia memaafkan, maka gugurlah hukuman.<sup>32</sup>

Adapun jarimah qishash diyat ini terdiri lima, yaitu pembunuhan sengaja (*al-qatlul-amdu*), pembunuhan semi-sengaja (*al-qatlul syibhul amdi*), pembunuhan

---

<sup>30</sup> Ahmad Hanafi, *Op. Cit.*, h. 7.

<sup>31</sup> Mardani, *Op. Cit.*, h. 116.

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 116-117.

kesilapan (tidak sengaja, *al-qatlul khata'*), penganiayaan sengaja (*al-jarhul-'amdu*), dan penganiayaan tidak sengaja (*al-Jarhul-khata'*).<sup>33</sup>

Jika dicermati bentuk jarimah qishash diyat ini dengan jarimah hudud, pada dasarnya terdapat persamaan disamping terdapat pula perbedaannya. Persamaannya adalah baik jarimah hudud maupun jarimah qishash diyat ada hak Tuhan. Dalam artian Tuhan sudah menetapkan jenis perbuatan dan hukumnya. Sedangkan perbedaannya adalah jarimah qishash diyat ada hak adami/perorangan yang membuka pemaafan bagi si pembuat jarimah oleh orang yang menjadi korban, wali, atau ahli warisnya. Dalam kasus jarimah qishash diyat ini korban atau ahli warisnya dapat memaafkan si pembuat jarimah, meniadakan qishash menggantikan dengan diyat atau meniadakan sama sekali. Adapun bagi korban yang tidak memiliki wali atau ahli waris, maka hak perorangan ini diberikan kepada penguasa yang bertindak sebagai walinya. Berbeda dengan jarimah qishash diyat, jarimah hudud multak hak Tuhan.

c. Jarimah Ta'zir

Ta'zir secara etimologi berasal dari kata '*azzara, yuaziru, ta'zirun*, yang artinya mencegah dan menolak atau mendidik dan memukul dengan sangat'.<sup>34</sup> Menurut Rahmat Hakim, ta'zir menurut arti katanya adalah *at-ta'dib* artinya memberi pengajaran.<sup>35</sup> Sedangkan secara terminologi ta'zir adalah hukuman pendidikan yang dijatuhkan hakim terhadap tindak pidana atau maksiat yang

---

<sup>33</sup> Ahmad Hanafi, *Op. Cit.*, h. 8.

<sup>34</sup> Mardani, *Op. Cit.*, h. 117.

<sup>35</sup> H. Rahmat Hakim, *Op.Cit.*, h. 30

belum ditentukan hukumannya oleh syari'at, atau telah ditentukan hukumannya, akan tetapi tidak terpenuhi syarat pelaksanaannya seperti: bercumbu selain faraj, dan mencuri yang tidak terpenuhi syarat untuk pemotongan tangan.<sup>36</sup> Abu Ishaq al-Siraji mendefenisikan ta'zir dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada terpidana dan mencegahnya untuk tidak mengulangi lagi kejahatan itu.<sup>37</sup>

Dari uraian di atas, nampak bahwa pada dasarnya jarimah ta'zir merupakan jarimah yang hukumannya belum ditentukan oleh dalam al-Qur'an maupun Hadits, sehingga hak untuk menentukan hukumannya tergantung pada manusia, dalam hal ini adalah penguasa (hakim). Adapun mengenai hukuman (sanksi), syara hanya menyebutkan bentuk-bentuk hukuman, dari yang seberat-beratnya sampai yang ringan-ringannya, tanpa mengharuskan hukuman tertentu untuk jarimah tertentu pula, seperti pada jarimah hudud dan qishash/diyat.<sup>38</sup> Selain itu, jarimah ta'zir juga pada dasarnya merupakan jarimah yang berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta kemaslahatannya. Oleh karena itu jarimah ta'zir ini juga sering disebut dengan jarimah kemaslahatan umum.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 117-118.

<sup>37</sup> *Ibid*.

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 31

<sup>39</sup> *Ibid*.

Atas dasar itu, sehingga Rahmat Hakim menyimpulkan membagi jarimah ta'zir menjadi dua, yakni ta'zir syara dan ta'zir penguasa.<sup>40</sup> Dua bentuk jarimah ta'zir tersebut memiliki perbedaan di samping kesamaannya. Ta'zir syara ditentukan oleh syara dan bersifat abadi, artinya sejak diturunkan oleh pembuat syariat dan sampai kapan pun akan dianggap sebagai jarimah. Ini karena jarimah syara sejak awalnya memang telah dianggap sebagai perbuatan maksiat, yaitu perbuatan yang dilarang karena perbuatan itu sendiri melakukannya dianggap perbuatan maksiat. Adapun ta'zir penguasa dan bersifat sementara bergantung pada keadaan dan dapat dianggap jarimah kalau memang diperlukan. Demikian pula, dapat dianggap bukan jarimah kalau memang menghendaki demikian. Hal ini karena pada dasarnya ta'zir penguasa itu bukan suatu perbuatan yang dilarang mengerjakannya, namun keadaan menyebabkan perbuatan itu dilarang.

## 2. Jarimah sengaja dan jarimah tidak sengaja.

Pembagian jarimah sengaja dan tidak sengaja ini di dasarkan kepada niat si pelaku. Pada jarimah sengaja (jara-im maqshudah), si pembuat dengan sengaja melakukan perbuatannya, sedang ia tahu bahwa perbuatannya itu dilarang (salah).<sup>41</sup> Demikian arti umum jarimah sengaja, meskipun pada jarimah pembunuhan, kesengajaan mempunyai arti khusus, yaitu sengaja mengerjakan perbuatan yang dilarang dan memang akibat perbuatan itu dikehendaki pula. Kalau si pembuat dengan sengaja berbuat tetapi tidak menghendaki akibat-akibat

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 32

<sup>41</sup> Ahmad Hanafi, *Op. Cit.*, h. 13.

perbuatannya itu, maka disebut “pembunuhan semi sengaja”. Dalam hukum positif disebut sebagai penganiayaan yang membawa kematian.

Berbeda dengan jarimah sengaja, jarimah tidak sengaja (jara-im ghairu maqshudah) yaitu suatu jarimah dimana si pembuat atau si pelaku tidak sengaja mengerjakan perbuatan yang dilarang, akan tetapi perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kekeliruannya.<sup>42</sup> Adapun kekeliruan ini terbagi atas dua macam, yakni, *pertama*, pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan tetapi jarimah akibat perbuatannya itu sama sekali tidak diniatkan seperti seseorang menembak binatang buruan tetapi mengenai manusia. Kedua pelaku tidak sengaja berbuat dan jarimah yang terjadi tidak diniatkannya sama sekali seperti orang yang sedang tidur jatuh dan mengenai orang lain.<sup>43</sup>

### 3. Jarimah Positif dan Jarimah negatif.

Pembagian jarimah seperti ini didasarkan atas tinjauan, apakah jarimah itu diperintahkan atau dilarang, atau apakah jarimah tersebut berupa perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat. Hal ini dijelaskan oleh Abdul Qadir ‘Audah sebagai berikut:

“jarimah positif terjadi karena mengerjakan sesuatu yang dilarang seperti mencuri, zina, dan memukul. Jarimah negatif terjadi karena tidak mengerjakan sesuatu perbuatan yang diperintahkan, seperti seorang saksi tidak melaksanakan persaksiannya dan seseorang tidak mengeluarkan zakat. Kebanyakan jarimah terdiri dari jarimah positif dan sedikit sekali yang berupa jarimah negatif.”<sup>44</sup>

### 4. Jarimah kelompok (masyarakat) dan Perseorangan.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Mardani, *Op. Cit.*, h. 120.

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 121.

Pembagian jarimah atas jarimah kelompok dengan jarimah perseorangan ini didasarkan atas tinjauan terhadap orang yang menjadi korban. Jarimah masyarakat ialah suatu jarimah dimana hukuman terhadapnya dijatuhkan untuk menjaga kepentingan masyarakat, baik jarimah tersebut mengenai perseorangan atau mengenai ketentraman masyarakat dan keamanannya.<sup>45</sup> Menurut para fuqaha, penjatuhan hukuman atas perbuatan tersebut menjadi hak Tuhan dan hal ini berarti bahwa terhadap hukuman tersebut tidak pengampunan atau peringanan atau menunda-nunda pelaksanaannya.

Sedangkan jarimah perseorangan ialah suatu jarimah, dimana hukuman terhadapnya dijatuhkan untuk melindungi kepentingan perseorangan, meskipun sebenarnya apa yang menyinggung perseorangan juga berarti menyinggung masyarakat. Pada dasarnya yang tergolong jarimah masyarakat adalah jarimah yang dikategorikan jarimah hudud, sedangkan jarimah perseorangan adalah lebih kepada jarimah yang dikategorisasikan sebagai jarimah qishash diyat. Hal ini pada dasarnya tidak berarti bahwa jarimah perseorangan (yang tergolong jarimah qishash diyat) tidak merugikan masyarakat, melainkan lebih pada penerapan sanksi hukum.

##### 5. Jarimah biasa dan jarimah Politik

Pembagian jarimah atas jarimah biasa dan jarimah politik ini dibedakan dari segi tabiatnya yang khusus. Syariat Islam mengadakan pemisahan antara jarimah biasa (*jarimah 'adiyyah*) dengan jarimah politik (jarimah pemberontakan).

---

<sup>45</sup> Ahmad Hanafi, *Op. Cit.*, h. 17.

Pemisahan tersebut didasarkan atas kemaslahatan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan atas pemeliharaan sendi-sendinya. Oleh karena itu tidak semua jarimah yang diperbuat untuk tujuan-tujuan politik dapat disebut jarimah politik, meskipun kadang-kadang ada jarimah biasa yang diperbuat dalam suasana politik tertentu bisa digolongkan kepada jarimah politik. Sebenarnya corak kedua macam jarimah tersebut tidak berbeda, baik mengenai macam maupun cara memperbuatnya. Perbedaan antara keduanya terletak pada motif (faktor pembangkitnya).

Di kalangan para fuqaha “jarimah politik” disebut “*albaghyu*” dan pembuat-pembuatnya disebut “*al-bughaat*” atau “*al-fi-atul baghiyah*”. Yang dimaksud dengan “*bughaat*” ialah orang-orang yang membenrontak kepada imam (penguasa Negara) berdasarkan *ta’wil* (alasan) tertentu dan mempunyai kekuatan tertentu. Menurut fuqaha lain, bughaat ialah segolongan kaum muslimin yang menentang (melawan) penguasa Negara tertinggi (*al-imam al-a’dham*) atau wakilnya, karena dua hal:

*Pertama*, tidak mau melaksanakan sesuatu kewajiban seperti zakat, atau sesuatu hukum syara’ yang berhubungan dengan hak Tuhan atau manusia, atau tidak mau menyatakan setia dan tunduk kepada penguasa tertinggi tersebut dengan mengulurkan tangan bagi orang yang dekat, atau dengan memberitahukan demikian kepada orang lain, bagi orang yang tinggal jauh, kalau orang yang dekat atau berjauhan itu tergolong orang terkemuka (ahlul halli

wal'aqdi). *Kedua*, hendak mencopot penguasa tertinggi karena dipandang telah menyeleweng





### BAB III

## KONSEP PORNOGRAFI

### A. Pengertian Pornografi

Hampir semua negara, termasuk Amerika Serikat yang dianggap liberal sekalipun, juga melarang penyebaran pornografi. Pada umumnya belum ada kriteria yang jelas kapan suatu produk dikategorikan sebagai porno dan kapan dibilang tidak porno. Kriteria “dapat merangsang gairah seksual orang lain” yang selama ini dipakai sebagai patokan memang sangat relatif.

Istilah atau kata pornografi merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, yakni *porne* yang artinya pelacur dan *graphein* yang artinya ungkapan.<sup>46</sup> Jadi berdasarkan asal katanya, pornografi berarti ungkapan pelacur. Atau menunjuk kepada segala karya baik yang dituangkan dalam bentuk tulisan atau lukisan yang menggambarkan pelacur.<sup>47</sup> Sedangkan porno adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia dengan tujuan membangkitkan rangsangan seksual, mirip, namun berbeda dengan erotika, meskipun kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian.<sup>48</sup>

Arti pornografi menurut asal katanya tersebut, dari waktu ke waktu juga mengalami perubahan makna. Dalam artian makna pornografi itu sendiri secara

---

<sup>46</sup> Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2009), h. 144.

<sup>47</sup> Ade Armando, *Mengupas Batas Pornografi* (Jakarta: Meneg Pemberdayaan Perempuan, 2004), h. 1.

<sup>48</sup> Istibsjaroh, *Menimbang Hukum Pornografi, Pornoaksi, dan Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam*. <http://Istibsyaroh.files.wordpress.com.pdf> (10 Agustus), h. 8.

bahasa dipengaruhi oleh perubahan dalam kehidupan sosial atau bahkan dipengaruhi oleh pergeseran cara pandang masyarakat. Dalam kamus Bahasa Indonesia, kata pornografi diartikan sebagai penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan untuk membangkitkan nafsu birahi. Jadi jika dicermati makna pornografi yang dirumuskan dalam kamus bahasa Indonesia, menekankan adanya maksud untuk membangkitkan birahi. Olehnya itu, suatu penggambaran bagaimana pun vulgarnya tidak akan dikategorikan sebagai pornografi jika pelaku tersebut tidak ada niat atau maksud untuk membangkitkan birahi.

Berbeda dengan makna pornografi yang dikemukakan di atas, dalam perspektif hukum pornografi memiliki makna tersendiri. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan Pornoaksi menjelaskan pengertian pornografi sebagai berikut:

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”

Sementara itu, menurut Abu Al-Ghifari, pornografi adalah tulisan, gambar, lukisan, tayangan audiovisual, pembicaraan, dan gerakan-gerakan tubuh tertentu secara vulgar yang semata-mata untuk menarik perhatian lawan jenis.<sup>49</sup> Mencermati pandangan Al-Ghifari ini, pada dasarnya pornografi diartikan sebagai penggambaran atau gerakan-gerakan tubuh tertentu secara vulgar melalui instrumen media massa maupun media elektronik dengan tujuan menarik perhatian lawan jenis. Jadi maksud

---

<sup>49</sup> Abu Al-Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern* (Bandung: Mujahid, 2002), h. 30.

atau tujuan penggambaran tersebut senantiasa menjadi barometer dalam menentukan sebuah perbuatan dapat dikategorikan sebagai pornografi.

Dari penjelasan pengertian pornografi yang dikemukakan di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan tentang pengertian pornografi, yakni suatu pertunjukan yang memuat pencabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat dengan melalui media elektronik, baik berupa gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui bentuk media komunikasi. Jadi sederhana pornografi itu merupakan penggambaran tentang hal-hal yang bersifat cabul yang dilakukan dengan perantara media massa atau media komunikasi. Hal inilah yang membedakan antara pornografi dan pornoaksi. Kalau pornoaksi langsung dilakukan oleh seseorang tanpa perantara media massa atau media komunikasi, sementara pornografi mensyaratkan adanya mediator baik berupa visual atau audio visual. Dengan kata lain, pornografi adalah pornoaksi yang termuat dalam media (lewat perantara media).

## **B. Unsur-Unsur Pornografi**

Dalam hukum pidana, sebuah perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, maka haruslah memenuhi unsur-unsur sebuah tindak pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam aturan perundang-undangan. Hal ini erat hubungannya dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Berbicara masalah pornografi, di atas telah diberikan pengertian atau batasan tentang pornografi sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 44 tahun

2008, yakni “gambar’ sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Jadi, dengan pengertian atau batasan yang diberikan oleh undang-undang di atas, maka dapatlah dipahami tentang sebuah tindak pidana yang dikategorikan tindak pidana pornografi.

Namun, sebelum penulis menguraikan tentang unsur-unsur tindak pidana pornografi, penulis terlebih dahulu mengemukakan beberapa pandangan pakar hukum terkait unsur-unsur tindak pidana secara umum. Menurut Teguh Prasetyo, unsur tindak pidana terdiri atas dua unsur, yakni unsur objektif dan unsur subjektif.<sup>50</sup> Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

1. Sifat-sifat melanggar hukum.
2. Kualitas dari si pelaku. Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

---

<sup>50</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 48-49.

Sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.

Sementara itu, menurut Moelyatno sebagaimana yang dikutip oleh Teguh Prasetyo, unsur-unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:<sup>51</sup>

1. kelakuan dan akibat (perbuatan). Misalnya, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah PNS.
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. Misalkan pada pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 50-51.

3. Keadaan tambahan yang memberikan pidana. Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.<sup>52</sup>
4. Unsur melawan hukum yang objektif. Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.
5. Unsur melawan hukum yang subjektif. Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalkan dalam pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang mengambil barang.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh para pakar hukum di atas, maka dapatlah dirumuskan unsur-unsur tindak pidana pornografi sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 44 tahun 2008. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur objektif tindak pidana pornografi

---

<sup>52</sup> Lihat. Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata (KUHP, KUHPA, & KUHPd)* (Cet. I; Jakarta: Visimedia, 2008), h. 84.

a. Sifat melanggar hukum. Sifat melanggar hukum yang dimaksud adalah erat hubungannya dengan asas legalitas dalam hukum pidana, yakni tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana sebelum ditentukan oleh Undang-Undang bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Dengan demikian yang dimaksud dengan sifat melanggar hukum di sini adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, dalam hal ini adalah Undang-Undang pornografi. Jadi, jika seseorang melakukan suatu perbuatan dan perbuatannya tersebut adalah tidak melawan hukum (undang-undang pornografi), maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pornografi. Berdasarkan hal tersebut, maka suatu perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana pornografi yang mana merupakan bagian dari syarat objektif adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Bab II Undang-Undang Pornografi, yakni sebagai berikut:<sup>53</sup>

- 1) memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak (pasal 4 ayat 1).

---

<sup>53</sup> Lihat. Bab II Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

- 2) Menyediakan jasa pornografi yang menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau mengesankan ketelanjangan, menyajikan secara eksplisit alat kelamin, mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual, menawarkan atau mengiklankan, baik langsung atau tidak langsung layanan seksual (pasal 4 ayat 2).
- 3) Meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 4 ayat 1 (pasal 5).
- 4) Memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.
- 5) Mendanai perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
- 6) Menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi (pasal 8).
- 7) Menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi (pasal 9)
- 8) Mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya (Pasal 10).
- 9) Melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam pasal 4,5,6,7,8,9,10 (pasal 11).



10) Mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi (pasal 12).

b. Kualitas dari si pelaku. Dalam konteks tindak pidana pornografi, kualitas si pelaku ini tidak sebagaimana yang dinyatakan dalam kasus pidana kejahatan jabatan sebagaimana dalam pasal 415 KUHP, yakni disyaratkan pelaku harus pegawai negeri.<sup>54</sup> Melainkan dalam konteks tindak pidana pornografi tidak membatasi kualitas jabatan seseorang, melainkan berlaku umum. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Bab I ketentuan umum, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Pornografi yang menunjuk setiap orang, yakni orang perorang atau korporasi, baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Selain itu, kualitas pelaku dalam tindak pidana pornografi ini mencakup pelaku yang menjadikan orang lain sebagai objek maupun objek pornografi itu sendiri. Namun demikian, dalam Undang-Undang Pornografi terdapat pengecualian bagi suatu tindakan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang tidak termasuk dalam hal-hal sebagaimana yang dimuat dalam pasal 4 ayat 1. Hal ini dilakukan demi tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang tata caranya diatur dengan aturan perundang-undangan (pasal 13 dan 14). Dengan demikian tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 jika dilakukan tidak

---

<sup>54</sup> Lihat. Solahuddin, *Op. Cit.*, h. 98.

berdasarkan/sesuai dengan tata cara yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan dikategorikan tindak pidana pornografi.

- c. Kausalitas. Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. Misalkan penyebabnya adalah seseorang menikam orang lain, akibatnya orang yang tertikam tersebut terluka atau meninggal dunia. Dalam konteks tindak pidana pornografi unsur kausalitas ini tidak nampak sebagaimana yang terjadi dalam tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan. Sebab, akibat yang muncul dari tindak pidana pornografi ini berupa kerusakan moral bagi orang-orang yang menyaksikannya sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 3 Undang-Undang Pornografi.

## 2. Unsur Subjektif.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa unsur subjektif merupakan unsur yang terdapat atau melekat pada diri pelaku tindak pidana berupa unsur kesengajaan atau perencanaan.<sup>55</sup> Dalam konteks tindak pidana pornografi, unsur subjektif ini sebagaimana yang tertuang dalam pasal 8, yaitu unsur *dolus* (kesengajaan). Kesengajaan di sini tidak hanya menyangkut masalah kesengajaan menjadikan orang lain sebagai objek atau model pornografi, maupun kesengajaan menjadi objek atau model pornografi, melainkan juga mencakup kesengajaan dalam pembuatan, penyebarluasan, penyimpanan, mengunduh, dan lain-lain sebagaimana yang tertera dalam Bab II tentang larangan dan pembatasan.

---

<sup>55</sup> Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, h. 49.

### C. Ruang Lingkup Pornografi

Dalam pembahasan mengenai ruang lingkup pornografi ini sesungguhnya hal akan diuraikan adalah menyangkut sejauhmana suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai pornografi? Berbicara ruang lingkup atau cakupan pornografi sesungguhnya bersifat intra subjektif bahkan intersubjektif, dimana subjektivitas individu satu dengan lainnya membentuk seks normatif, walaupun pada akhirnya konsep ini selalu berubah berdasarkan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Gambaran mengenai pornografi pada masyarakat secara luas bukan merupakan sesuatu yang menetap, khususnya ketika ia berhadapan dengan pertumbuhan yang terjadi dalam bidang budaya, sosial, ekonomi dan politik. Dalam kondisi seperti ini ruang lingkup pornografi menjadi suatu entitas yang dapat mengalami perubahan, sesuai dengan latar belakang *social cultural* yang ada.

Oleh karena itu, ruang lingkup pornografi pada dasarnya dari masa ke masa mengalami perubahan/perkembangan pula. Namun demikian, sebagai sebuah persoalan hukum bagaimana pun relatifnya konsep pornografi, maka mesti terdapat suatu batasan atau ruang lingkup dari permasalahan tersebut. Hal ini karena pada dasarnya salah satu tujuan hukum yang hendak dicapai adalah kepastian hukum. Dengan demikian, persoalan pornografi harus memiliki ruang lingkup atau batasan yang jelas agar dapat dipahami secara totalitas.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam point pengertian pornografi di atas, istilah pornografi merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata, yakni *porne* dan *graphein*, yang masing-masing berarti pelacur

dan ungkapan. Jadi berdasarkan asal katanya, pornografi berarti ungkapan pelacur. Jadi berdasarkan asal katanya, pornografi berarti ungkapan pelacur. Atau menunjuk kepada segala karya baik yang dituangkan dalam bentuk tulisan atau lukisan yang menggambarkan pelacur.<sup>56</sup> Sedangkan porno adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia dengan tujuan membangkitkan rangsangan seksual, mirip, namun berbeda dengan erotika, meskipun kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian.<sup>57</sup>

Dari penjelasan di atas dapatlah dipahami persoalan ruang lingkup pornografi, yakni menyangkut segala sesuatu karya baik dalam bentuk tulisan maupun lukisan yang menggambarkan pelacur. Ruang lingkup ini masih sangat abstrak dan dalam konteks kekinian ruang lingkup pornografi tersebut telah mengalami perkembangan, dalam artian seiring perkembangan teknologi ruang lingkup pornografi telah bertambah luas.

Oleh karena itu, agar di dapatkan satu pemahaman yang pasti (kepastian hukum) terkait masalah ruang lingkup pornografi ini, maka perlu penulis kemukakan pengertian pornografi menurut hukum (positif). Dalam Undang-Undang N0. 44 tahun 2008 tentang Pornografi, pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media

---

<sup>56</sup> Ade Armando, *Loc. Cit.*

<sup>57</sup> Istibsjaroh, *Loc. Cit.*

komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Dari definisi pornografi yang dikemukakan di atas berdasarkan undang-undang pornografi, maka dapatlah dipahami ruang lingkup pornografi secara umum yang meliputi porno teks, porno suara dan pornografi dalam arti sempit. Porno teks disini memiliki arti bahwa segala bentuk tulisan yang memuat kecabulan yang dapat membangkitkan gairah atau nafsu birahi seseorang atau orang lain dianggap sebagai pornografi. Selanjutnya, porno suara dapat diartikan sebagai segala bentuk suara, bunyi atau percakapan yang memuat kecabulan yang dapat membangkitkan gairah atau nafsu birahi seseorang atau orang lain dianggap merupakan pornografi. Sedangkan pornografi dalam artian sempit (gambar porno, baik gambar bergerak maupun tidak bergerak) dapat diartikan segala bentuk gambar, baik gambar bergerak (rekaman/video) maupun gambar yang tidak bergerak yang menggambarkan/memperlihatkan kecabulan atau eksploitasi seksual yang dapat membangkitkan gairah atau nafsu birahi dianggap merupakan pornografi.

Jadi berdasarkan penjelasan singkat di atas, menurut bentuknya pornografi dapat dibedakan atas porno teks, porno suara dan pornografi (dalam arti sempit). Ketiga bentuk pornografi tersebut, memiliki satu ciri sama dan merupakan prasyarat dari pornografi, yakni semua bentuk sebagaimana yang disebutkan terkonsumsi/dikonsumsi lewat perantaraan (instrumen) media, baik media cetak (majalah, koran, surat kabar, pamflet, spanduk, dan lain-lain) maupun media

elektronik (televisi, internet, VCD, dan lain-lain). Instrumen yang digunakan inilah yang menjadi salah satu pembeda antara pornografi dengan pornoaksi.



**BAB IV**  
**TINDAK PIDANA PORNOGRAFI**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM**

**A. Konsep Pornografi dalam Hukum Islam**

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* merupakan agama yang sempurna. Di dalamnya terkandung ajaran yang sempurna dan menyempurnakan. Dengan demikian Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (*hablun minallah*), melainkan juga mengatur hubungan manusia dengan manusia (*hablun minan-nas*) dan manusia dengan alam. Aturan tersebut merupakan aturan (hukum) Tuhan yang telah ditetapkan dengan pasti tanpa ada perubahan di dalamnya. Hal ini berarti bahwa hukum Islam merupakan hukum yang absolut dan universal, tidak terikat oleh dimensi ruang dan waktu.

Sebagai hukum yang absolut dan universal, hukum Islam (*syariat*) telah mengatur seluruh dimensi kehidupan umat manusia, dari hal yang paling sederhana sampai hal yang paling kompleks. Karena hukum Islam telah mengatur seluruh dimensi kehidupan umat manusia, maka tentunya masalah pornografi pula telah diatur di dalam hukum Islam. Jika kesimpulan ini dibenarkan, maka dengan sendirinya jauh sebelum hukum positif mempersoalkan masalah pornografi, hukum Islam telah terlebih dahulu mengaturnya. Namun, pertanyaan yang harus dijawab terkait masalah tersebut adalah “bagaimanakah konsep pornografi dalam hukum Islam?”.

Berbicara pornografi dalam hukum Islam jika kita membuka rujukan-rujukan (sumber-sumber) hukum Islam, maka terminologi tersebut tidak akan pernah dijumpai. Sebab, sebagaimana kita ketahui bahwa terminologi pornografi merupakan terminologi yang berasal dari Yunani, yang terdiri atas dua kata, yakni *Porne* dan *graphein* yang masing-masing memiliki arti pelacur dan ungkapan.<sup>58</sup> Kemudian terminologi tersebut populer di negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.

Namun demikian, bukan berarti terminologi tersebut tidak terdapat dalam hukum Islam, lantas persoalan pornografi tidak diatur dalam hukum Islam. Sebab, sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa Islam merupakan agama yang sempurna dan di dalamnya mengandung ajaran yang sempurna dan menyempurnakan, maka secara apriori dapat disimpulkan bahwa masalah pornografi juga telah diatur di dalam hukum Islam. Untuk membenarkan hal tersebut, maka sebagai insan akademis yang menjunjung tinggi prinsip ilmiah, maka sebuah keharusan untuk membenarkan hal tersebut berdasarkan bukti ilmiah. Untuk melakukan hal tersebut, maka diperlukan metode berpikir analogi.

Metode berpikir analogi (*qiyas*) dalam *usul fiqh* merupakan sebuah metode yang digunakan oleh para mujtahid untuk menemukan hukum atas suatu persoalan baru yang hukumnya kurang jelas. Hubungannya dengan masalah pornografi ini, maka metode analogi (*qiyas*) dilakukan untuk menemukan konsep pornografi dalam hukum Islam dengan beranjak dari hukum positif. Olehnya itu, merupakan sebuah

---

<sup>58</sup> Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi: Ditinjau dari Hukum Islam*, (Cet. III; Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 144.



keharusan untuk menjelaskan atau memaparkan terlebih dahulu tentang pornografi dalam hukum positif dan setelah itu barulah melakukan penelusuran di dalam hukum Islam tentang pornografi.

Walaupun masalah (konsep) pornografi dalam perspektif hukum positif telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, namun untuk lebih memperjelas lagi penulis dalam Bab ini akan mengemukakan terlebih dahulu secara singkat konsep pornografi dalam hukum positif. Pornografi dalam hukum positif (khususnya di Indonesia) diatur di dalam KUHP BAB XIV tentang kejahatan kesusilaan. Namun, setelah lahirnya Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi, maka yang menjadi rujukan atas tindak pidana pornografi adalah bukan lagi KUHP. Hal ini karena berlaku asas *lex specialis derogate legi generalis* “hukum yang lebih khusus mengenyampingkan hukum yang lebih umum”.

Pengertian pornografi dalam Undang-Undang No.44 tahun 2008 dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1, yakni “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Selanjutnya, dalam Bab II, yakni pasal 4 sampai dengan pasal 14 menjelaskan lebih rinci terkait perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana pornografi. Perbuatan-perbuatan tersebut adalah:

1. Perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan,

memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a) Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b) Kekerasan seksual;
- c) Masturbasi atau onani;
- d) Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e) Alat kelamin; atau
- f) Pornografi anak.

2. Perbuatan penyediaan jasa pornografi yang:

- a) Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b) Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c) Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d) Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung atau tidak langsung layanan seksual.

3. Perbuatan meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana yang termuat dalam point-point nomor 1 di atas.

4. Perbuatan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana yang dimaksud dalam poin-poin nomor 1 di atas. Hal ini terdapat pengecualiaan, yakni bagi mereka yang diberi kewenangan atas itu oleh aturan perundang-undangan.

5. Perbuatan mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam poin-poin nomor 1 di atas.
6. Perbuatan yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.
7. Perbuatan menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.
8. Perbuatan mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.
9. Perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek pornografi.
10. Perbuatan mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai tindakan pornografi dalam perspektif hukum positif adalah perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, menyediakan jasa pornografi, meminjamkan atau mengunduh pornografi, memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi, mendanai atau memfasilitasi perbuatan pornografi, menjadikan orang lain sebagai objek atau model pornografi, mempertontonkan diri, atau orang

lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang mengandung pornografi, melibatkan anak dalam kegiatan pornografi, mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunkan produk atau jasa pornografi.

Semua perbuatan yang disebutkan di atas merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang kapasitasnya sebagai subjek, yakni subjek yang menawarkan pornografi kepada orang lain baik orang maupun korporasi yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, subjek yang turut serta dalam pembuatan pornografi maupun subjek yang mengkonsumsi pornografi. Masalah subjek yang mengkonsumsi pornografi ini nampak dalam pasal 5 dan 6 yang menyebutkan kata “memanfaatkan” dan “mengunduh”. Tidak hanya sebagai subjek (orang yang memanfaatkan) pornografi, berdasarkan uraian tentang suatu perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai pornografi dapat pula disimpulkan bahwa objek atau model dalam pornografi dapat pula dijerat dengan tindak pidana pornografi. Hal ini dapat terjadi jika seseorang tersebut menjadi objek atau model pornografi atas kesengajaannya atau dengan persetujuan dirinya (pasal 8 Undang-Undang Pornografi).

Namun demikian, meskipun perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana pornografi dalam hukum positif telah dinyatakan dengan rinci, tetap saja tindak pidana pornografi masih abstrak atau sulit untuk dikongkritkan. Hal ini karena semua item-item yang telah dijelaskan tersebut tidak memiliki standarisasi atau barometer. Kalau pun memiliki standarisasi, maka standarisasi tersebut juga masih

sangat abstrak. Adapun standarisasi yang dipakai dalam perspektif hukum positif adalah sebagaimana yang terdapat dalam pengertian pornografi yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi, yakni melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Dengan demikian, suatu perbuatan bagaimanapun vulgarnya jika tidak melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut tetap saja tidak dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana pornografi. Apalagi kita ketahui bersama bahwa di Indonesia terdapat berbagai macam suku, adat, budaya dan agama, maka dengan demikian akan melahirkan pula relativitas nilai (pluralitas nilai). Karena melahirkan relativitas nilai, maka sulit untuk menentukan suatu tindakan/perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana pornografi berdasarkan Undang-Undang Pornografi. Olehnya itu, hal ini melahirkan ketidakpastian hukum. Sementara kita ketahui bersama bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang hendak diwujudkan.

Berdasarkan pemaparan singkat terkait masalah pornografi di atas, maka dapatlah ditarik beberapa hal yang substansial terkait pornografi dalam hukum positif, yakni larangan untuk memamerkan kemaluan (aurat) di muka umum (yang bukan muhrimnya) atau dengan kata lain adalah perintah untuk memelihara tubuh/kemaluan—khususnya bagi objek atau model pornografi, larangan untuk mendekati perbuatan zina (zina mata)—khususnya bagi para konsumen pornografi, serta larangan bagi subjek yang memproduksi pornografi. Namun demikian, standarisasinya tidak jelas (abstrak) sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Jika disimak penjelasan terkait pornografi di atas, sesungguhnya di dalam hukum Islam telah lebih dulu mengatur masalah tersebut (pornografi), bahkan batasannya lebih luas dan lebih konkrit dari konsep pornografi yang dijelaskan dalam perspektif hukum positif. Masalah pornografi sebagaimana yang terkandung dalam hukum positif, di dalam hukum Islam erat hubungannya dengan masalah menjaga aurat, tata cara berpakaian dan memelihara pandangan atau menundukan pandangan (*ghadhdh al-basyar*). Jadi, sesungguhnya yang menjadi substansi dari pornografi dalam perspektif Islam adalah masalah aurat.

Kata “aurat” berasal dari bahasa Arab yang secara literal berarti celah, kekurangan, sesuatu yang memalukan atau sesuatu yang dipandang buruk, dari anggota tubuh manusia dan yang membuat malu jika dilihat.<sup>59</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa aurat adalah merupakan bagian tubuh yang harus ditutupi. Hal ini erat hubungannya dengan ajaran Islam yang menganggap tubuh sebagai amanah Allah bagi masing-masing pemilik tubuh yang bersangkutan, yang wajib dipelihara dan dijaga dari segala perbuatan dosa, perbuatan tercela dan perbuatan yang merugikan diri pemilik tubuh itu sendiri dan masyarakat serta bangsa.<sup>60</sup>

Pemeliharaan tubuh dari segala aspek perbuatan terlarang dan tercela itu adalah demi keselamatan dan kemaslahatan hidup dan kehidupan untuk semua pihak, terutama pihak pemilik tubuh bersangkutan, baik ketika ia hidup di dunia maupun di

---

<sup>59</sup> Istibsjaroh, *Menimbang Hukum Pornografi, Pornoaksi, dan Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam*. <http://Istibsyaroh.files.wordpress.com.pdf> (10 Agustus), h. 21

<sup>60</sup> Neng Djubaedah, *Op. Cit.*, h. 88.

akhirat kelak. Mengenai tata cara berpakaian atau menutup aurat ini dalam Islam dijelaskan pada Qur'an Surah an-Nur ayat 30 dan 31. Surat an-Nur ayat 30:<sup>61</sup>

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ

اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Terjemahannya:

*“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman. “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu perbuat.”*

Demikian pula dalam surat an-Nur ayat 31 Allah berfirman, bahwa:<sup>62</sup>

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ

<sup>61</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Cet. Ulang; Semarang: Wicaksana, 1994), h. 548.

<sup>62</sup> *Ibid.*

الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا تَخْفِينَ  
 مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٠﴾

Terjemahannya:

“Katakanlah kepada perempuan yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau perempuan-perempuan Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyi. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

Menurut Tafsir Al-Munir mengenai Surah an-Nur ayat 30-31 adalah:<sup>63</sup>

Afirmasi ayat di atas dengan kata “min” mengerucut pada fenomena *ghadul bashar* (menundukan pandangan) dalam realita yang cakupannya cenderung lebih luas, dalam arti praktek *ghadul bashar* mengalami kelonggaran, karena melihat individu yang terkualifisir dengan muhrim dengan batasan tertentu yaitu selain daerah pusar hingga lutut dibolehkan, demikian halnya dengan memandang wajah seorang perempuan dan telapak tangannya, serta kedua telapak kaki dalam salah satu

<sup>63</sup> Istibsjaroh, *Op. Cit.*, h. 25-26.



riwayat. Sedangkan perihal *farj* sangat terbatas sebagaimana yang disinyalir dalam kitab al-kasyaf. Dengan demikian melihat sesuatu tidaklah dilarang kecuali pada hal-hal tertentu, sebaiknya *jima*’ dilarang dengan pengecualian, dengan bahasa lugas asal perihal *farj* adalah haram, adapun hukum asal memandang sesuatu adalah mubah (boleh). Adapun instruksi menundukan pandangan didahulukan dari perintah menjaga *farj* adalah karena pandangan merupakan *starting point* dari penyakit zina.

Islam adalah agama yang solutif yang memberikan tuntutan dalam segenap segmen kehidupan manusia. Islam menawarkan solusi alternatif jika seseorang tidak sengaja melihat hal-hal yang diharamkan, maka ia wajib menundukan pandangan dan mengalihkan dengan cepat. Terkait masalah ini Rasulullah saw. Bersabda sebagaimana yang terdapat dalam kitab Imam Nawawi.<sup>64</sup>

وَعَنْ جَرِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ، فَقَالَ: "أَصْرِفْ بَصْرَكَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya:

Jarir bin ‘Abdillah al-Bajaly ra berkata: “Aku bertanya kepada Nabi Saw perihal pandangan mata yang terjadi secara spontanitas, beliau memerintahkan aku untuk mengalihkan mataku”.

Abu Dawud juga meriwayatkan dari Buraidah berkata: Rasulullah Saw bersabda “Wahai Ali, jangan engkau ikuti satu pandangan dengan pandangan lain, kamu boleh memandangnya untuk kali pertama, yang kedua adalah keharaman bagimu”.

Hal demikian dimaksudkan untuk mengejewantahkan benih kebaikan dan menimalisir dekadensi moral serta membentengi dari kawah kenistaan dan dosa.

---

<sup>64</sup> Imam Nawawi, *Nuzhatul Muttaqin*, terj. Farid Dhofir, dkk, Syarah dan Terjemah Riyadhus Shalihin Jilid 2 (Cet. V; Jakarta: Al-I’tishom, 2009), h. 777.

Sebagian orang salaf bertutur pandangan merupakan panah yang langsung menusuk ke hati. Oleh karenanya, Allah mensinergikan dengan dua intruksi menjaga kemaluan dan pandangan dalam satu *framework* al-Nur ayat 30. Riwayat dari Abi Ummamah ra, dari Nabi Saw juga mengafirmasikan bahwa tuntutan yang demikian menumbuhkan suburkan nilai-nilai kebaikan, Nabi bersabda: “Seseorang muslim ketika melihat keindahan dari kaum hawa, dan kemudian menundukkan pandangannya, niscaya Allah akan menumbuhkembangkan prosesi ibadah yang penuh dengan kenikmatan baginya.

**Surat al-Nur ayat 31:**

“Tunduklah pandanganmu dari selain suamimu, dan jagalah kemaluanmu dari zina seperti “sihaq”. Implikasi dari perintah tersebut adalah keharaman bagi perempuan untuk memandang laki-laki asing dibarengi getaran syahwat atau tidak, menurut pendapat mayoritas ulama. Hal ini dilandasi dengan dalih riwayat Abu Dawud dan al-Tirmidzi dan Ummu Salamah, bahwasanya ia sedang berada di rumah Rasulullah Saw dan kemudian Maimunnah dan kemudian Ibn Ummi Maktum juga mendatangi rumah Nabi tersebut. Kisah ini terjadi pasca perintah hijab, Rasulullah Saw bersabda.<sup>65</sup>

"أَحْتَجِبَا مِنْهُ". فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى، لَا يُبْصِرُنَا، وَلَا يَعْرِفُنَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفَعَمِيَاوَانِ أَنْتُمَا؟ أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ؟". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

*Artinya:*

*“Berhijablah kalian berdua darinya. “Maka kami menjawab, “Wahai Rasulullah bukankah dia buta. Tiak bisa melihat kami dan tidak mengetahui kami? Maka*

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, h. 778.

*Nabi saw. Bersabda, “Apakah kalian berdua juga buta, bukankah kalian bisa melihatnya?”.*

Sebagian ulama lain membolehkan kaum perempuan memandang laki-laki asing tanpa syahwat kecuali daerah pusar hingga lutut dengan dasar argumentatif riwayat dan shahih Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah saw memandang orang-orang Habsyi bermain pada hari raya di Masjid, adapun Aisyah melihat mereka di belakang Nabi, Nabi menutupinya dari mereka hingga Aisyah merasa bosan dan pulang. Pendapat ini lebih memberikan kemudahan di masa kita. Menyoroti perintah hijab, kaum cendekiawan yang mengusung pendapat kedua ini kebolehan perempuan melihat laki-laki lain tanpa syahwat menginterpretasikan intruksi berhijab dari Ibn Ummi Maktum dalam koridor sah/boleh. Adapun tindakan Aisyah sebagaimana yang tergambar dalam riwayat di atas lebih digambarkan karena sifat wara' yang terpatri dalam dirinya. Interpretasi ini dikuatkan oleh fenomena keseharian kaum Hawa yang bepergian ke pasar dan masjid serta perjalanan yang mengenakan cadar sehingga kaum Adam tidak melihatnya, di sisi lain kaum lelaki tidak diperintahkan mengenakan cadar sehingga kaum perempuan tidak melihatnya, maka hal yang demikian menunjukkan adanya perbedaan hukum antara kaum Hawa dan kaum Adam.

Berdasarkan redaksi ayat dan tafsir di atas, Islam menganjurkan umatnya (khususnya laki-laki) agar menahan atau menjaga pandangannya, serta menjaga kemaluannya dari hal-hal yang dapat mengantarkan mereka pada perbuatan zina. Tidak hanya kaum lelaki, Islam pun mewajibkan kaum perempuan agar berpakaian

dengan sopan dengan cara menutup aurat. Menutup aurat dan memperlihatkan aurat memiliki sisi psikologis yang mempengaruhi kepribadian laki-laki yang memandang dan perempuan yang dipandang. Dengan menutup aurat dapat menumbuhkan kondisi yang harmonis keselarasan di antara aspek-aspek kepribadian. Sementara itu, *al-tabarruj* (berpakaian senonoh) adalah keadaan yang disertai berbagai gejala perilaku yang neurosis *al-suluk al-ishabi*.<sup>66</sup>

Selain apa yang telah dikemukakan di atas, masalah pornografi yang terkait dengan masalah aurat ada beberapa hadits Rasulullah yang melarang memakai pakaian yang tembus pandang, erotis, sensual, dan sejenisnya larangan bagi laki-laki berkhawat (berdua-duaan) di tempat yang sunyi tanpa orang ke tiga dengan perempuan yang bukan muhrimnya,<sup>67</sup> atau pun antara laki-laki dengan laki-laki homoseksual, perempuan dengan perempuan lesbian. Tidak diragukan lagi secara psikologis bahwa menguatnya perasaan wanita melalui kebebasan memilih pakaian yang sesuai dengan standar syariat, menumbuhkan perasaan positif berupa persamaan perempuan di tengah masyarakat muslim dengan corak tertentu dalam menutup aurat dan semakin dalamnya perasaan terhadap kemuliaan. Sementara itu, mengenai hukum *tabarruj* atau pakaian dan gerak tubuh yang menimbulkan rangsangan seksual, ini adalah jelas haram.

---

<sup>66</sup> Yusuf Madan, *Sex Education Teens: Pendidikan Sex Remaja dalam Islam* (Jakarta: Hikmah, 2004), h. 103.

<sup>67</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 287 tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi, tanggal 22 Agustus 2001/2 Jumadil Akhir 1422 H., h. 10.

Menurut Syekh Abu ‘Ala Al-Maududi kata *tabarruj* bila dikaitkan dengan wanita memiliki arti sebagai berikut: *pertama*, menampakkan keelokan wajah dan bagian tubuh yang dapat membangkitkan birahi dihadapan kaum laki-laki yang bukan muhrimnya; *kedua*, memamerkan pakaian dan perhiasan yang indah serta memamerkan diri di depan laki-laki yang bukan muhrimnya; *ketiga*, bersolek dan menggunakan parfum secara berlebihan ketika keluar rumah; *keempat*, melantunkan suara-suara yang menggoda.<sup>68</sup>

Dalam fiqh, pembahasan mengenai aurat didasarkan pada wacana tubuh dengan berbagai dimensi sensualnya. Fiqh menganggap ada beberapa tubuh yang tidak pantas untuk diperlihatkan, tidak layak bahkan memalukan. Pada awal inilah definisi aurat. Orang menyebut aurat untuk hal-hal yang tidak pantas untuk diperlihatkan, tidak layak bahkan memalukan. Kemudian sesuatu yang memalukan itu justru bisa membangkitkan gairah lain yang melihatnya untuk melakukan sesuatu yang tidak dikehendakinya. Memalukan dan menggairahkan adalah sesuatu yang kontekstual, karena itu fiqh membedakan antara aurat laki-laki dan aurat perempuan. Mengenai batas anggota tubuh aurat dianggap aurat, untuk laki-laki walaupun ada perbedaan, tetapi secara umum mayoritas ulama berpendapat bahwa laki-laki seharusnya menutup anggota tubuh antara pusar dan kedua lutut kaki. Sedangkan aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.

---

<sup>68</sup> Abu Al-Ghifari, *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravaganza* (Jakarta: Mujtahid, 2002), h. 29.

Adapun mengenai menyaksikan secara langsung aurat seseorang yang bukan haknya seperti pornoaksi dan pornografi adalah haram, kecuali untuk tujuan yang dibolehkan oleh syara', misalnya memberi pertolongan medis. Ini akan berlaku juga pada para pembuat pornografi dan pornoaksi, kameramen, pengarah gaya, sutradara, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut definisi agama Islam, segala sesuatu yang mengakibatkan seseorang cenderung melakukan perbuatan asusila (*fakhisyah*) adalah berdosa. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Terjemahannya:*

*“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.*

Sementara itu, menurut hukum Islam seperti yang difatwakan Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 22 Agustus 2001, berdasarkan surat al-Isra' ayat 32 kita dilarang mendekati zina, an-Nur ayat 30-31 mengatur tentang tata cara bergaul, memelihara kehormatan, dan batas 'aurat, al-Ahzab ayat 59 mengatur tentang 'aurat kaum perempuan mukminah, dan al-Maidah ayat 2 tentang kewajiban saling menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan larangan melakukan tolong menolong dalam melakukan perbuatan dosa

dan pelanggaran, maka batasan pornografi maupun pornoaksi menurut hukum Islam telah jelas.<sup>69</sup>.

Dari seluruh penjelasan di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa pada dasarnya, konsep pornografi di dalam hukum Islam memiliki cakupan yang luas dan kongkrit. Hal ini berbeda dengan pandangan hukum positif yang cenderung membatasi pornografi dalam hal-hal yang sudah sangat vulgar dan harus bertentangan dengan rasa kesusilaan di masyarakat. Sementara dalam konsep hukum Islam, meskipun sesuatu tersebut tidak nampak vulgar, asalkan sudah memperlihatkan aurat (bagian tubuh yang harus ditutup) atau melihat aurat orang lain yang bukan muhrim sudah dianggap haram dan merupakan perbuatan dosa.

Selain itu, dalam perspektif hukum Islam standarisasi pornografi bukanlah berdasarkan rasa kesusilaan di dalam masyarakat yang lahir dari adat dan budaya masyarakat. Melainkan rasa kesusilaan di dalam masyarakat haruslah berdasarkan standarisasi hukum Islam (syariat Islam). Dalam konteks ini, eksistensi hukum Islam dari awal kelahirannya yang turun secara berangsur-angsur hingga akhir risalah Kerasulan Muhammad tidak hanya berposisi sebagai alat kontrol sosial, melainkan juga sebagai alat rekayasa sosial yang kini baru menjadi wacana dan diupayakan dalam hukum positif.

---

<sup>69</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi, *Op. Cit.*, h. 2.

## B. Sanksi Pidana Pornografi dalam Hukum Islam

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan konsekuensi atas suatu perbuatan pidana yang dilakukan. Jadi, jika seseorang tidak melakukan tindak pidana atau perbuatan pidana, maka secara yuridis seseorang mustahil dikenai oleh sanksi pidana. Berbicara masalah tindak pidana, dalam terminologi Islam menggunakan dua istilah, yakni *jinayah* dan *jarimah*. Kedua istilah tersebut secara etimologis mempunyai arti dan arah yang sama. Selain itu, istilah yang satu menjadi *muradif* (sinonim) bagi istilah yang lainnya atau keduanya bermakna tunggal. Walaupun demikian kedua istilah berbeda dalam penerapan kesehariannya.

Kata Jinayah artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau jahat. Jinayah adalah *masdar* (kata asal) dari kata kerja (*fi'il madhi*) janna yang mengandung arti suatu kerja yang diperuntukkan bagi satuan laki-laki yang telah berbuat dosa atau salah.<sup>70</sup> Pelaku kejahatan itu sendiri disebut *janni* yang merupakan bentuk singular bagi satuan laki-laki atau bentuk *mufrad mudzakkara* sebagai pembuat kejahatan atau *isim fa'il*. Adapun sebutan pelaku kejahatan wanita adalah *janniah*, yang artinya dia (wanita) yang telah berbuat dosa. Sedangkan orang yang menjadi sasaran atau objek perbuatan si *janni* atau si *janniah* atau mereka yang terkena dampak dari perbuatan si pelaku dinamai *mujnaa alaih* atau korban.<sup>71</sup>

Secara terminologi, menurut Sayid Sabiq definisi jinayah dalam definisi syara' adalah setiap perbuatan yang diharamkan, dan perbuatan yang diharamkan

---

<sup>70</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah*, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 12.

<sup>71</sup> *Ibid.*



oleh setiap perbuatan yang dilarang oleh Allah (syari'), karena ada bahaya yang menimpa agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta.<sup>72</sup> Jika dicermati pengertian yang dikemukakan oleh Sayid Sabiq ini erat hubungannya dengan *al-maqasid syariah* (tujuan hukum Islam). Sedangkan menurut Abdul Kadir Audah, pengertian jinayah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dan harta benda.<sup>73</sup>

Adapun kata jarimah secara etimologis berarti melukai, berbuat dosa atau kesalahan.<sup>74</sup> Secara terminologis yang dimaksud dengan jarimah adalah larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.<sup>75</sup> Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan perkataan syara' pada pengertian tersebut di atas, yang dimaksud bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap *jarimah* apabila dilarang oleh syara'. Juga perbuatan atau tidak berbuat dianggap sebagai *jarimah*, kecuali apabila diancam hukuman terhadapnya. Dengan demikian, berbicara masalah jarimah erat hubungannya dengan asas legalitas atau asas kepastian hukum sebagaimana yang dinyatakan dalam surat al-Isra' ayat 15:

---

<sup>72</sup> Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 112.

<sup>73</sup> Rahmat Hakim, *Loc. Cit.*

<sup>74</sup> Mardani, *Op. Cit.*, h. 110.

<sup>75</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h.

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ  
وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

Terjemahannya:

*“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan meng'azab sebelum kami mengutus seorang rasul”.*

Dari penjelasan singkat di atas dapatlah disimpulkan bahwa kata jarimah identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum. Dalam hukum positif, contoh-contoh jarimah di atas (jarimah pencurian, jarimah pembunuhan, dan sebagainya) diistilahkan dengan tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan, dan sebagainya. Jadi dalam hukum positif jarimah diartikan delik atau tindak pidana. sedangkan kata jinayah dalam pemakaiannya lebih mempunyai arti lebih umum (luas), yaitu ditunjukan bagi segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan kejahatan manusia dan ditunjukan bagi satuan perbuatan dosa tertentu. Oleh karena itu, dalam konteks tindak pidana pornografi ini kata yang digunakan adalah kata jarimah.

Berbicara masalah jarimah (tindak pidana), para ulama secara umum membagi jarimah atas beberapa macam, yakni:<sup>76</sup>

<sup>76</sup> Mardani, *Op. Cit.*, h. 114-115.

1. Dilihat dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dibagi menjadi tiga, yaitu jarimah hudud, jarimah qishash diyat, dan jarimah ta'zir.
2. Dilihat dari segi niat si pembuat, jarimah dibagi dua, yaitu: jarimah sengaja dan jarimah tidak sengaja.
3. Dilihat dari segi cara mengerjakannya, jarimah dibagi menjadi jarimah positif dan jarimah negative.
4. Dilihat dari orang yang menjadi korban (yang terkena) akibat perbuatan, jarimah dibagi menjadi jarimah perseorangan dan jarimah kelompok (masyarakat).
5. Dilihat dari segi tabiatnya yang khusus, jarimah dibagi menjadi biasa dan jarimah politik.

Sehubungan dengan masalah sanksi pidana bagi tindak pidana (pornografi), maka yang relevan dari pembagian jarimah di atas adalah pembagian jarimah dari segi berat ringannya hukuman, yakni jarimah hudud, jarimah qishash diyat dan jarimah ta'zir. Olehnya itu, sebelum menentukan sanksi pidana bagi tindak pidana pornografi, maka hal yang paling penting adalah dari ketiga bentuk jarimah (tindak pidana) di atas, pornografi masuk dalam bentuk jarimah yang mana. Untuk menjawab masalah tersebut, maka penting kiranya penulis kemukakan penjelasan tentang ketiga bentuk tindak pidana tersebut, yakni:

1. Jarimah hudud.

Kata “hudud” adalah bentuk jamak bahasa Arab “*Hadd*” yang berarti pencegahan, penekanan atau larangan.<sup>77</sup> secara terminologis jarimah hudud adalah suatu jarimah yang bentuknya telah ditentukan syara sehingga terbatas jumlahnya. Selain ditentukan bentuknya (jumlahnya), juga ditentukan hukumannya secara jelas, baik melalui Al-Qur’an maupun As-Sunnah. Lebih dari itu jarimah ini termasuk dalam jarimah yang menjadi hak Allah.<sup>78</sup> Oleh karena itu, jarimah ini tidak dikenali pemaafan atas perbuatan jarimah, baik oleh orang perorangan yang menjadi korban jarimah maupun oleh negara. Adapun hukuman bagi pelaku jarimah ini hanya ada satu hukuman untuk setiap jarimah. Karena hanya ada satu macam hukuman untuk setiap jarimah, tidak ada pilihan hukuman bagi jarimah ini dan tentu saja tidak mempunyai batas tertinggi maupun terendah seperti layaknya hukuman lainnya. Menurut para ulama, jarimah yang termasuk dalam kelompok *hudud* ada tujuh macam *jarimah*, yaitu perzinahan, *qadzaf* atau menuduh orang berzina, *asyrib* atau minum-minuman keras, *sariqah* atau pencurian, *hirabah* atau pembegalan, *al-baghyu* atau pemberontakan, dan *riddah* atau keluar dari agama Islam.

## 2. Jarimah qishash diyat.

Yang dimaksud dengan jarimah qishash diyat ini adalah perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman qishash atau hukuman diyat.<sup>79</sup> Seperti halnya jarimah

---

<sup>77</sup> A. Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan (Syariah II)*, (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), h. 6.

<sup>78</sup> Rahmat Hakim, *Op. Cit.*, h. 26.

<sup>79</sup> Ahmad Hanafi, *Op. Cit.*, h. 7.

hudud, jarimah qishash diyat pun telah ditentukan jenisnya maupun besar hukumannya. Jadi, jarimah ini pun terbatas jumlahnya dan hukumannya pun tidak mengenal batas tertinggi maupun terendah karena hukuman untuk jarimah ini hanya satu untuk setiap jarimah. Adapun perbedaan keduanya (jarimah hudud dan jarimah qishash diyat) adalah jarimah qishash diyat menjadi hak perseorangan atau hak adami yang membuka kesempatan pemaafan bagi si pembuat jarimah oleh orang yang menjadi korban, wali, atau ahli warisnya.<sup>80</sup> Jadi dalam kasus jarimah qishash diyat ini, korban atau ahli warisnya dapat memaafkan perbuatan si pembuat jarimah, meniadakan qishash dan menggantinya dengan diyat atau meniadakan diyat sama sekali. Adapun yang termasuk jarimah qishash diyat terdiri atas lima jarimah, yakni pembunuhan sengaja (*al-qatlul-amdu*), pembunuhan semi sengaja (*al-qatlu syibhul amdi*), pembunuhan tidak sengaja (*al-qatlul khata'*), penganiayaan sengaja (*al-jarhul 'amdu*), penganiayaan tidak sengaja (*al-jarhul khata'*).<sup>81</sup>

### 3. Jarimah ta'zir.

Yang tergolong jarimah ini adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman ta'zir. Ta'zir menurut arti katanya adalah *at-ta'dib* artinya memberi pengajaran. Dalam fiqh jinayah, ta'zir merupakan suatu bentuk jarimah yang bentuk atau macam jarimah serta hukuman (sanksi)

---

<sup>80</sup> Rahmat Hakim, *Op. Cit.*, h. 27.

<sup>81</sup> Ahmad Hanafi, *Op. Cit.*, h. 8. Lihat juga. Mardani, *Op. Cit.*, h. 117.

jarimah ialah ditentukan penguasa.<sup>82</sup> Jadi jarimah ini sangat berbeda dengan jarimah hudud dan jarimah qishash diyat yang macam bentuk hukumannya ditentukan oleh syara'. Tidak ditentukannya macam dan hukuman pada jarimah ta'zir sebab jarimah ini berkaitan dengan perkembangan serta kemaslahatan masyarakat. Seperti kita pahami bersama bahwa pada dasarnya kemaslahatan selalu berubah berkembang dari satu waktu ke waktu dan dari satu tempat ke satu tempat lain. Oleh karena itu sesuatu dapat dianggap kemaslahatan pada suatu masa, bisa jadi tidak lagi pada waktu yang lain. Demikian pula halnya, sesuatu itu dapat dianggap maslahat disuatu tempat, ada kemungkinan tidak lagi demikian di tempat lain. Atas dasar itu, jarimah ta'zir ini juga sering disebut dengan jarimah kemaslahatan umum.<sup>83</sup> Seperti telah disinggung di atas, jarimah ta'zir itu tidak ada batasan jumlahnya. Hal ini karena disamping banyaknya, juga mungkin terjadi fluktuasi, perubahan waktu dan tempat sesuai dengan kemaslahatannya. Namun demikian, syara menyebutkan sebagian kecil dari jarimah dan berlaku untuk seluruh tempat tanpa pengecualiaan. Jarimah ta'zir seperti ini berlaku abadi di seluruh tempat dan tidak akan terjadi perubahan terhadapnya, artinya perbuatan-perbuatan seperti itu akan dianggap selamanya sebagai jarimah. Jarimah ta'zir yang ditentukan syara di antaranya adalah khianat, suap-menyuap, memasuki rumah orang lain tanpa izin, makan makanan tertentu, ingkar janji, menipu

---

<sup>82</sup> Rahmat Hakim, *Op. Cit.*, h. 30.

<sup>83</sup> *Ibid.*, h. 31.

timbangan, riba, berjudi dan sebagainya.<sup>84</sup> Dari penjelasan tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jarimah *ta'zir* itu terbagi dalam dua kategori, *ta'zir syara* dan *ta'zir penguasa*. *Ta'zir syara* ditentukan syara dan bersifat abadi, artinya sejak diturunkan oleh pembuat syariat sampai kapan pun akan dianggap jarimah. Ini karena semenjak awalnya jarimah *ta'zir syara* memang telah dianggap sebagai suatu perbuatan maksiat, yaitu perbuatan yang dilarang karena perbuatan itu sendiri dan dilakukannya dianggap perbuatan maksiat. Adapun *ta'zir penguasa* ditentukan oleh penguasa dan bersifat sementara bergantung pada keadaan dan dapat dianggap jarimah kalau memang diperlukan. Hal ini karena pada dasarnya *ta'zir penguasa* itu bukan suatu perbuatan yang dilarang mengerjakannya, namun keadaan menyebabkan perbuatan itu dilarang.

Dari penjelasan terkait masalah bentuk-bentuk jarimah dilihat/ditinjau dari berat ringannya hukumannya (sanksi pidananya), jika kita hubungkan dengan tindak pidana pornografi, maka tindak pidana pornografi tidak dapat dikategorikan secara mutlak sebagai tindak pidana hudud maupun *ta'zir*. Namun jelas adalah tindak pidana pornografi tidak termasuk jarimah (tindak pidana) qishash diyat. Hal ini karena sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa jarimah qishash diyat telah ditetapkan oleh syara' terkait bentuk-bentuk jarimahnya, yakni mengenai masalah pembunuhan dan penganiayaan, entah pembunuhan disengaja, semi sengaja, tidak sengaja atau kah penganiayaan sengaja dan tidak sengaja.

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, h. 31-32.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan tentang pornografi di atas maka tindak pidana (*jarimah*) pornografi menurut hemat penulis dapat dikategorikan sebagai *jarimah* (tindak pidana) hudud pada satu sisi dan pada sisi yang lain dapat dikategorikan sebagai *jarimah* (tindak pidana) ta'zir, khususnya ta'zir syara. Dimasukannya *jarimah* pornografi dalam *jarimah* ta'zir syara karena pada dasarnya, *jarimah* pornografi merupakan sebuah perbuatan yang memang dilarang oleh syara' sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Qur'an surah al-Isra' ayat 32, yakni tentang larangan untuk tidak mendekati zina. Selain itu, di dalam Al-Qur'an juga sebagaimana yang telah dijelaskan di atas (point A) memerintahkan kepada umat manusia, khususnya kepada umat Islam agar memelihara pandangan dan menutup auratnya.

Sedangkan alasan penulis mengkategorikan pornografi pada satu sisi sebagai *jarimah* hudud, karena pada dasarnya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam konsep pornografi dalam Islam maupun dalam hukum positif di atas terdapat tiga oknum, yakni:

1. Oknum/orang/korporasi yang berposisi sebagai subjek yang membuat (memproduksi), baik dengan cara memotret atau merekam (video) hal-hal yang mengandung pornografi dan/atau menyebarkan hal-hal yang mengandung pornografi sebagaimana yang telah dijelaskan menurut hukum Islam di atas.



2. Oknum/orang yang berposisi sebagai subjek yang menyimpan dan/atau mengkonsumsi dengan cara mengunduh hal-hal yang mengandung pornografi.
3. Oknum/orang yang berposisi sebagai objek pornografi dengan sengaja, baik pornografi yang isinya hanya dilakoni oleh seorang diri atau berpasangan, seperti gambar atau film yang menggambarkan adegan persenggamaan.

Jika dicermati tiga pembagian oknum/pelaku tindak pidana pornografi sebagaimana yang telah penulis kemukakan di atas, maka pada satu sisi tindak pidana pornografi dapat dikategorikan sebagai jarimah *ta'zir syara'* sehingga pelakunya dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*. Hal ini nampak pada oknum atau pelaku tindak pidana yang melakukannya dengan cara menyimpan atau mengkonsumsi pornografi sebagaimana yang telah penulis kemukakan dalam point nomor 2 (dua). Sementara itu, pada sisi yang lain pelaku tindak pidana pornografi dapat dijatuhi dengan hukuman had (*jarimah hudud*), khususnya bagi pelaku atau oknum yang dengan sengaja berposisi sebagai objek atau model pornografi yang mana dalam pornografi tersebut pelaku melakukan adegan persenggamaan dengan bukan pasangan yang halal baginya. Sebab, hal ini sudah merupakan zina.<sup>85</sup>

Selain dua bentuk hukuman (sanksi pidana) yang dikemukakan di atas, menurut hemat penulis, pelaku tindak pidana pornografi juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dengan cara turut berbuat jarimah hudud. Hal ini dapat disimak

---

<sup>85</sup> Zina adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan. Lihat. A. Rahman I Doi, *Op.Cit.*, h. 35.

dari pembagian sebagaimana yang dijelaskan dalam point nomor 1(satu), khususnya bagi pelaku yang mengajak/menghasut, mengadakan persepakatan dengan orang lain (objek pornografi yang menggambarkan adegan persenggamaan/zina), atau memberi bantuan atau kesempatan untuk dilakukannya jarimah pornografi dengan berbagai cara, tanpa melakukan zina secara langsung. Mengenai hukuman/sanksi pidana bagi pelaku yang turut berbuat jarimah tersebut, penulis akan menguraikannya di bawah ini, namun sebelumnya penulis akan mengemukakan tentang konsep turut berbuat jarimah.

Masalah turut berbuat jarimah (tindak pidana), dalam perspektif fiqih para fuqaha membedakannya atas dua, yakni turut berbuat langsung dan turut berbuat tidak langsung. Orang yang turut berbuat langsung dalam melakukan jarimah disebut *syarik mubasyir* dan perbuatannya disebut *isytirak mubasyir*. Sedangkan, orang yang tidak turut berbuat secara langsung dalam melaksanakan jarimah *syarik mutasabbib*, dan perbuatannya disebut *isytirak ghairul mubasyir* atau *isytirak bit-tasabbubi*.<sup>86</sup> Adapun perbedaan antara kedua orang tersebut ialah kalau orang pertama menjadi kawan nyata dalam pelaksanaan jarimah, sedang orang kedua menjadi sebab adanya *jarimah*, baik karena janji-janji atau menyuruh (menghasut) atau memberikan bantuan, tetapi tidak ikut serta secara nyata dalam melaksanakannya.<sup>87</sup>

Penjelasan di atas, untuk pelaku jarimah turut berbuat langsung sudah nampak jelas, yakni disini pelaku turut melakukan jarimah sebagaimana pelaku langsung yang

---

<sup>86</sup> Ahmad Hanafi, *Op. Cit.* h. 136-137.

<sup>87</sup> *Ibid.*, h. 137.

melakukan jarimah. Sedangkan dalam jarimah turut tidak berbuat langsung, pelaku disini hanya berposisi sebagai sebab adanya jarimah tersebut. Mengeni jarimah turut berbuat tidak langsung ini, para fuqaha menguraikan unsur-unsurnya sebagai berikut:<sup>88</sup>

1. perbuatan di mana kawan berbuat tidak langsung memberi bagian dalam pelaksanaannya, tidak diperlukan harus selesai dan juga tidak diperlukan bahwa pembuat asli (pembuat langsung) harus dihukum pula.
2. dengan persepakatan atau hasutan atau bantuan, dimaksudkan oleh kawan berbuat tidak langsung untuk terjadinya sesuatu jarimah tertentu. Kalau tidak ada jarimah tertentu yang dimaksudkan, maka ia dianggap turut berbuat pada setiap jarimah yang terjadi, apabila dimungkinkan oleh niatnya. Kalau jarimah yang terjadi bukan yang dimaksudkannya, maka tidak ada “turut berbuat”, meskipun karena persepakatan dan lain-lain itu sendiri ia bisa dijatuhi hukuman.
3. persepakatan. Persepakatan bisa terjadi karena adanya saling memahami dan karena kesamaan kehendak untuk memperbuat jarimah. Kalau tidak ada persepakatan sebelumnya, maka tidak ada “turut berbuat”.
4. menyuruh (menghasut; tahridl). Yang dimaksud dengan menghasut ialah membujuk orang lain untuk memperbuat jarimah, dan bujukan itu menjadi pendorong untuk diperbuatnya jarimah. Baik bujukan itu berpengaruh atau

---

<sup>88</sup> *Ibid.*, h. 144-147.

tidak terhadap adanya jarimah, namun bujukan itu sendiri adalah suatu ma'siat yang bisa dijatuhi hukuman.

5. memberi bantuan (*I'annah*). Orang yang memberi bantuan kepada orang lain dalam memperbuat jarimah dianggap sebagai kawan berbuat tidak langsung, meskipun tidak ada persepakatan untuk itu sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan tentang pembagian turut melaksanakan jarimah di atas, yakni turut berbuat langsung dan turut berbuat tidak langsung, maka dapat disimpulkan tentang seseorang yang melakukan tindak pidana pornografi yang memuat hubungan persenggamaan dengan cara berposisi sebagai pengambil gambar (kameramen) dan/atau lain sebagainya yang berhubungan dengan proses pembuatan pornografi tersebut (pelaku dalam point 1) sebagai pelaku jarimah hudud turut berbuat tidak langsung. Sebab, dalam konteks ini pelaku yang berposisi sebagai kameramen dan/atau yang lainnya memberikan bantuan atau melakukan persepakatan untuk perbuatan pornografi berupa mengambil gambar atau rekaman video tanpa melakukan hubungan persenggamaan (zina).

Adapun mengenai hukuman dari pelaku jarimah turut berbuat tidak langsung tersebut (khususnya tindak pidana pornografi yang memuat persenggamaan) dalam jarimah hudud atau qishash tidak dijatuhi hukuman yang telah ditentukan jumlahnya, bagaimanapun bentuknya turut membuatnya itu, melainkan dijatuhi hukuman ta'zir.<sup>89</sup> Hal ini didasarkan dari syariat Islam yang menjelaskan bahwa hukuman-hukuman yang telah ditentukan jumlahnya yakni dalam jarimah hudud dan qishash dijatuhi atas

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, h. 152.

pembuat langsung jarimah, bukan atas kawan membuatnya (pembuat tidak langsung).<sup>90</sup> Namun demikian, menurut hemat penulis ketika pelaku turut berbuat tidak langsung hanya dijatuhi hukuman ta'zir dalam konteks tindak pidana pornografi, maka hukuman ta'zir tersebut tentunya akan lebih berat dibanding dengan pelaku tindak pidana pornografi dimana pelaku atau subjek tersebut hanya berposisi sebagai konsumen atau melakukan penyimpanan terhadap hal-hal yang mengandung pornografi.

Dari seluruh rangkaian penjelasan di atas hubungannya dengan masalah sanksi pidana tindak pidana pornografi, maka dapat disimpulkan tentang sanksi pidana pornografi, yakni; *pertama*, pelaku tindak pidana pornografi dapat dijatuhi hukuman had/hudud. Hal ini khusus bagi para mereka yang dengan sengaja menjadi objek atau model dalam pornografi yang memuat masalah persenggaman lawan jenis atau sejenis (yang tidak ada ikatan yang halal). Sebab, tindakan atau perbuatan seperti ini merupakan tindak pidana/jarimah zina. Kedua, pelaku tindak pidana pornografi dapat dijatuhi hukuman ta'zir yang berat ringannya hukuman ditentukan penguasa. Ini dikhususkan bagi para pelaku selain yang disebutkan pada ponit pertama.

Adapun sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pornografi yang sudah tergolong melakukan zina adalah dengan cara didera atau dicambuk. Bagi pelaku zina yang belum menikah hukumannya dicambuk seratus kali dan diasingkan (dipenjarakan) satu tahun. Sedangkan bagi pezina yang telah menikah, dicambuk seratus kali dan dirajam sampai mati. Hal ini berdasarkan Al-Qur'an Surah an-Nur

---

<sup>90</sup> *Ibid.*, h. 151.

ayat 2 dan hadits Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Bukhari. Adapun bunyi Q.S an-Nur tersebut adalah:

الرَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾

Terjemahannya:

*“Perempuan dan lelaki yang berzina maka deralah setiap orang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah ada rasa belas kasihan kepada keduanya yang akan mencegah kamu untuk (menjalankan) Agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang yang beriman”.*

Sedangkan hadits riwayat Bukhari menyebutkan bahwa Nabi Saw bersabda, yani:<sup>91</sup>

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِّنْ أَسْلَمَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنَى فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَ وَكَانَ قَدْ أَحْصَى. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya:

*“Dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari r.a., bahwa seorang laki-laki dari Aslam datang kepada Rasulullah saw. Dan menceritakan bahwa dia telah berzina. Pengakuan ini diucapkan empat kali. Lalu Rasulullah saw. Menyuruh supaya orang itu dirajam (dilempari dengan batu). Sesungguhnya dia telah pernah kawin”.*

---

<sup>91</sup> Al-Imam Al-Bukhary, *Shahih Bukhari: Jilid I, II, III dan IV*, terj. Zainuddin Hamidy dkk, (Selangor: Klang Book Centre, 2009), h. 100.

Sementara itu, A Rahman I Doi mengutip hadits yang redaksinya agak sama dengan hadits di atas, dengan menambahkan bahwa bagi yang belum menikah hukunya dicambuk seratus kali dan diasingkan satu tahun. Dan bagi pezina yang telah menikah, dicambuk seratus kali dan dirajam sampai mati”.<sup>92</sup>



---

<sup>92</sup> A. Rahman I Doi, *Op. Cit.*, h. 41.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan dalam pembahasan, maka dalam bab ini penulis akan menyimpulkan masalah “Tindak Pidana Pornografi dalam perspektif Hukum Islam” sebagai berikut:

1. Islam sebagai agama yang sempurna dan menyempurnakan pada dasarnya telah mengatur seluruh persoalan dalam dimensi kehidupan umat manusia, termasuk persoalan pornografi. Pornografi dalam perspektif hukum Islam erat hubungannya dengan persoalan perintah untuk menutup aurat dan memelihara pandangan serta *al-tabbaruj*. Pornografi dalam perspektif hukum Islam selain memiliki cakupan yang sangat luas dibandingkan dengan hukum positif, pornografi dalam Islam juga memiliki batasan yang jelas yang tidak berpatokan pada standarisasi rasa kesusilaan di dalam masyarakat. Justru rasa kesusilaan dalam masyarakat hubungannya dengan masalah pornografi dalam Islam, haruslah mengikuti atau berdasarkan aturan/hukum Islam. Sehingga dengan demikian, pornografi dalam konsep Islam (hukum Islam) memiliki kepastian hukum.
2. Adapun sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pornografi dalam perspektif hukum Islam memiliki perbedaan dengan sanksi pidana dalam hukum positif. Dalam hukum Islam, sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana (jarimah)



pornografi terdiri atas dua, yakni *jarimah hudud* yang dihukum dengan hukuman *had* dan *jarimah ta'zir syara* yang dihukum dengan *ta'zir*. Hukuman *had* (*jarimah hudud*) diperuntukan bagi para pelaku (objek atau model) pornografi yang memainkan adegan persenggamaan dengan sengaja atau dengan persetujuan dirinya, dimana keduanya bukan merupakan hubungan/pasangan yang halal. Sedangkan *jarimah ta'zir syara* (hukuman *ta'zir*) diperuntukan bagi para pelaku selain yang menjadi objek atau model yang memainkan persenggamaan, baik kapasitasnya sebagai pelaku *jarimah* yang turut berbuat tidak langsung dan/atau pelaku yang hanya mengkonsumsi atau menyimpan atau menyebar luaskan hal-hal yang mengandung pornografi.

## **B. Saran-Saran.**

Adapun yang menjadi saran penulis setelah menyelesaikan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada masyarakat, khususnya bagi umat muslim agar memperdalam pemahaman agamanya, khususnya terkait dengan masalah tata cara berbusana (menutup aurat) dan memelihara pandangan agar dapat terhindar dari tindak pidana (*jarimah*) pornografi.
2. Disarankan kepada pemerintah, khususnya lembaga yang terkait dan berwenang agar melakukan sosialisasi terhadap seluruh masyarakat, khususnya umat Islam agar terhindar dari tindak pidana (*jarimah*) pornografi. Lebih khusus lagi kepada para pengambil kebijakan (perumus dan pembuat aturan perundangan-undangan) untuk melengkapi kekurangan yang terdapat

dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi agar terdapat kejelasan yang tegas terkait standarisasi pornografi, serta merumuskan sanksi yang berat bagi para pelaku agar masyarakat secara umum dapat terhindar dari tindak pidana pornografi dan akibat yang dimunculkannya.

3. Terakhir yang menjadi saran penulis adalah para mahasiswa dan akademisi hukum pidana dan ketatanegaraan, agar karya tulis ilmiah (skripsi) ini dapat dijadikan acuan penelitian tentang tindak pidana pornografi di masa yang akan datang.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhary, Al-Imam. *Shahih Bukhari: Jilid I, II, III dan IV*, terj. Zainuddin Hamidy dkk, Selangor: Klang Book Centre, 2009.
- Al-Ghifari, Abu. *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*. Bandung: Mujahid, 2002.
- , *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravaganza*. Jakarta: Mujtahid, 2002.
- Al-Munawar, Said Agil Husain, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* Cet. I; Jakarta: Penamadani, 2004.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Edisi I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Armando, Ade. *Mengupas Batas Pornografi*. Jakarta: Meneg Pemberdayaan Perempuan, 2004.
- Azizy, A. Qadri, *Melawan Globalisasi: Reinterpretasi Ajaran Islam (Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani)*. Cet. V; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- , *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Edisi Revisi. Cet. I; Jakarta: Teraju, 2004.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Cet. Ulang; Semarang: Wicaksana, 1994.
- Djubaedah, Neng, *Ponografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*. Cet. III; Jakarta: Kencana, 2009.
- Doi, A. Rahman I. *Hudud dan Kewarisan (Syariah II)*. Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 287 tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi, tanggal 22 Agustus 2001/2 Jumadil Akhir 1422 H
- Gassing, A. Qadir dan Wahyuddin Halim, ed., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Cet. II; Makassar: Alauddin Press, 2009.

- Hakim, Rahmat. Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayat)*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- HJ. Istibsjaroh. *Menimbang Hukum Pornografi, Pornoaksi, dan Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam*. <http://Istibsyaroh.files.wordpress.com.pdf> (10 Agustus 2013).
- Imam Nawawi. Imam, *Nuzhatul Muttaqin*, terj. Farid Dhofir, dkk, Syarah dan Terjemah Riyadhush Shalihin Jilid 2. Cet. V; Jakarta: Al-I'tishom, 2009.
- Madan, Yusuf. *Sex Education Teens: Pendidikan Sex Remaja dalam Islam*. Jakarta: Hikmah, 2004.
- Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Maulana, Rizky dan Putri Amelia, *Kamus Pelajar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Lima Bintang, tanpa tahun.
- Prajogo, Soesilo, *Kamus Hukum: Internasional-Indonesia*. Cet. I; tanpa tempat: WIPRESS, 2007.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Sholihati, Siti, *Wanita dan Media Massa*. Cet. I; Yogyakarta: TERAS, 2007.
- Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata*. Cet. I; Jakarta: Visimedia, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cet. 6; Bandung: ALFABETA, 2009.
- Wignjoebroto, Soetandyo dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta., ed. *Metode Penelitian Hukum: Kostelasi dan Refleksi*. Edisi I; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Iswan Haris** akrab di sapa Iswan lahir di Sungguminasa Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan pada tanggal 22 Maret 1991 dari pasangan Abd Haris dan Nurhayati, anak kedua dari 3 bersaudara. Alamat rumah di Jalan Poros Malino Pakatto Ca'di.

Tahun 1997 masuk di sekolah dasar tepatnya SDN Bontomanai. Pada tahun 2003 diterima di Sekolah Menengah Pertama (SMP Negeri 1 Bontomarannu Gowa), dan tamat tahun 2006. Kemudian mendaftar di SMA Negeri 1 Bontomarannu Gowa tamat tahun 2009.

Pada tahun 2009 terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam. Tahun 2013 berhasil meraih gelar Sarjana Hukum Islam (S.Hi) pertama di jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R